

LAPORAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG

TAHUN
2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**

LAPORAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG

TAHUN

2022

LAPORAN KINERJA

BPS KABUPATEN BANDUNG

2022



No. Publikasi : 32040.2301

Katalog : 1202059 .3204

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 156 Halaman

Naskah : BPS Kabupaten Bandung

Gambar Kulit : BPS Kabupaten Bandung

Diterbitkan Oleh : © BPS Kabupaten Bandung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Agung Hartadi, S.ST., M.E

Penyusun

Ir. Wanwan Herawan

Ria Yunita Emkaen, S.Si., M.E

Leni Nurlina, S.ST

Dewi Pertiwi Sitorus, S.ST

Ayu Puspita Wulandana Burhanuddin, S.ST

Firmansyah Saragih, A.Md

Pungky Adhitya, A.Md.



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 BPS Kabupaten Bandung disusun untuk memberi gambaran sekaligus sebagai penyampaian informasi kinerja yang terukur mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung yang dicapai selama tahun 2022. Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai suatu upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja.

Dalam menerapkan manajemen kinerja, salah satu fondasi utama adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang sangat kami hargai.

Soreang, 30 Januari 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung,



Agung Hartadi, SST, M.E.
NIP. 19750909 199403 1 001

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Ringkasan Eksekutif	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung	3
D. Sumber daya manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung dan Dukungan Anggaran	5
E. Sistematika Penyajian Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung	22
B. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2020-2024	28
C. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2022	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Analisis Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung	36
B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022	96
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan	132
B. Rencana Tindak Lanjut	133
LAMPIRAN	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum	6
Tabel 2	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel 3	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur	12
Tabel 4	Daftar Mutasi Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022	14
Tabel 5	Jumlah Anggaran Menurut Program Kegiatan BPS Kabupaten Bandung 2022	17
Tabel 6	Target Kinerja pada Renstra BPS Kabupaten Bandung 2020-2024	29
Tabel 7	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022	32
Tabel 8	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja 2022 BPS Kabupaten Bandung	37
Tabel 9	Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan	40
Tabel 10	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.1.	41
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.2.	43
Tabel 12	Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN	45
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.1.1.	46
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.1.2.	47
Tabel 15	Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan: Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN	49
Tabel 16	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.1.1.	50
Tabel 17	Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	51
Tabel 18	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.1.1.	52
Tabel 19	Rencana Aksi Suplemen BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022	54
Tabel 20	Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Terhadap Target Renstra 2020, 2022, 2024	57
Tabel 21	Perbandingan Pagu Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021-2022	64
Tabel 22	Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2022 Menurut Program	98
Tabel 23	Perbandingan realisasi Penyerapan Anggaran 2021-2022 Menurut Program	99
Tabel 24	Realisasi Penyerapan Anggaran Program PPIS Menurut Rincian Output Kegiatan	100
Tabel 25	Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2022 Menurut Jenis Belanja	101

Tabel 26	Alokasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022 Menurut Sasaran Strategis	105
Tabel 27	Efisiensi Anggaran berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran terhadap Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022	107
Tabel 28	Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022	108
Tabel 29	Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021-2022	111
Tabel 30	Perbandingan Nilai Biaya Penggunaan/Langgan Listrik BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2022 (Rupiah)	114
Tabel 31	Perbandingan Nilai Biaya Langganan Telpon per Tahun BPS Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022 (Rupiah)	116
Tabel 32	Rincian Revisi DIPA Anggaran Tahun 2022	116
Tabel 33	Rincian Output yang mengalami <i>Self blocking Automatic Adjustment</i> Anggaran Tahun 2022	117
Tabel 34	Perubahan Pagu Rincian Output Anggaran Tahun 2022	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPS Kabupaten Bandung	5
Gambar 2	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu Menurut Jenjang Jabatan Fungsional	7
Gambar 3	Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin	8
Gambar 4	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jenis Kelamin	8
Gambar 5	Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan	10
Gambar 6	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang	11
Gambar 7	Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang	12
Gambar 8	Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umu	13
Gambar 9	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Bandung yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan	42
Gambar 10	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Total Tahun 2018-2022	67
Gambar 11	Komposisi Alokasi Anggaran menurut Jenis Belanja terhadap Total Pagu BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022	105
Gambar 12	Komposisi Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja	106
Gambar 13	Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022 (persen)	111
Gambar 14	Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022	130

LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2021-2024	136
Lampiran 2	Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2022	138
Lampiran 3	Rincian SDM ASN BPS Kabupaten Bandung akhir 2021	141
Lampiran 4	Jadwal Kegiatan Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung 2022	142
Lampiran 5	Target-Realisasi <i>Response Rate</i> Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022	149
Lampiran 6	Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2022	154
Lampiran 7	Piagam Penghargaan yang diterima Tahun 2022	156

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS pada tahun 2022.

Secara umum, kinerja BPS tahun 2022 dapat dikatakan baik dengan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 102,34 persen. Seluruh sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalamnya memiliki capaian kinerja sangat baik atau lebih dari sama dengan 100 persen. Capaian Kinerja tertinggi terdapat pada sasaran ke empat, penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi dengan pencapaian sebesar 106,86 persen dimana hasil ini didorong dari pencapaian IKU hasil penilaian implementasi SAKIP sebesar 107,83 dan IKU persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS sebesar 105,89.

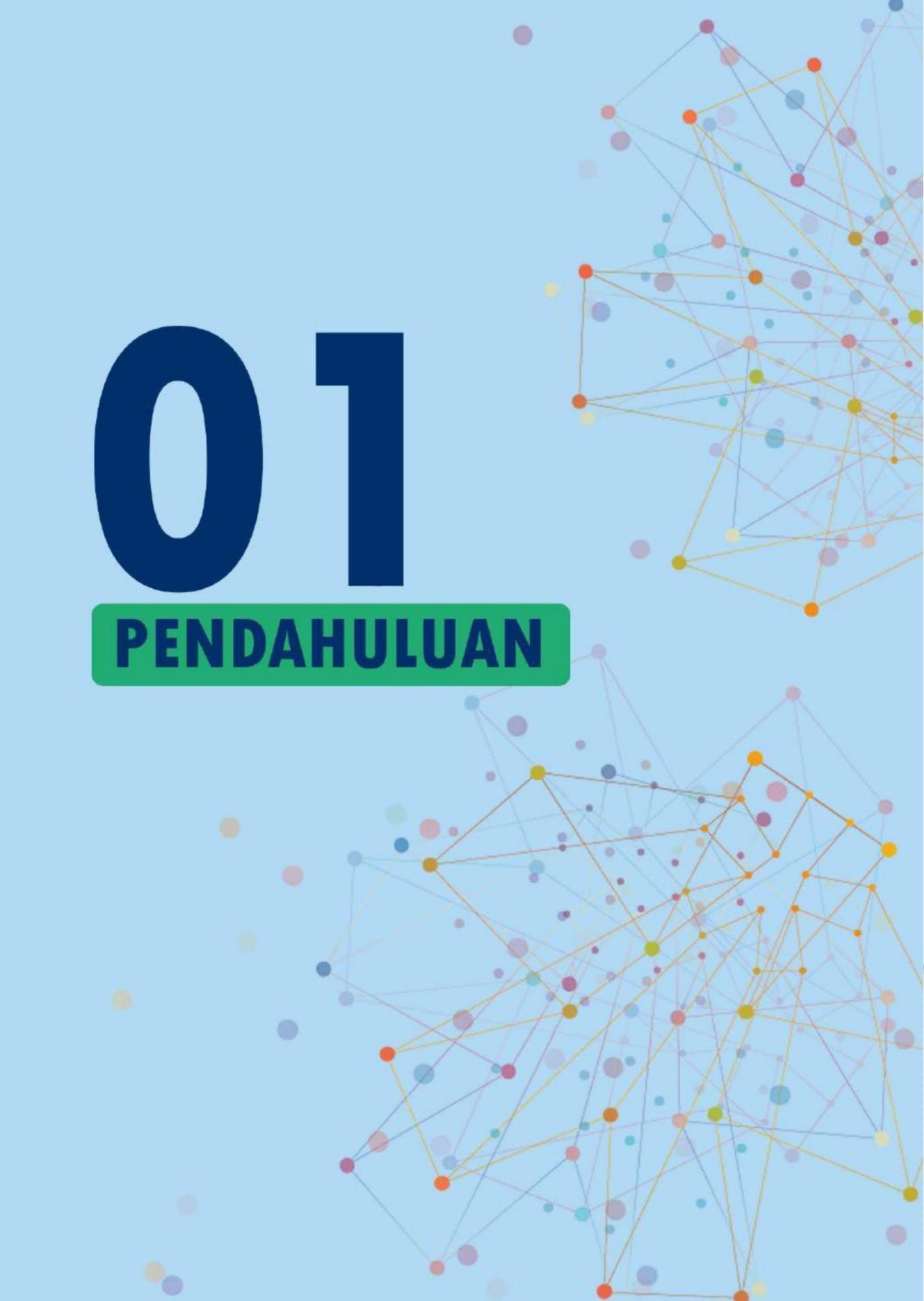
Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2022, BPS Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 57,035 milyar meningkat hingga 548,74 persen dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi sampai dengan akhir periode TA 2022 sebesar Rp 56,573 milyar atau 99,19 persen. Kontribusi realisasi terbesar berasal dari program Program Penyediaan dan Pelayanan Statistik sebesar 99,13 persen atau sebesar Rp 50,884 milyar sementara program Dukungan Manajemen sebesar 99,74 persen atau sebesar Rp 5,688 milyar.

BPS Kabupaten Bandung telah mengelola anggaran dengan relatif baik karena capaian nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) tetap diatas 90 persen. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari seluruh pegawai. Selain itu, sinergi dari seluruh pegawai juga telah diterapkan untuk mengupayakan efisiensi tidak hanya dari sisi penganggaran namun juga dari sisi sumber daya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

01

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

BPS Kabupaten Bandung merupakan instansi vertikal BPS yang bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. BPS Kabupaten Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik. Dalam penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 BPS Kabupaten Bandung sebagai instansi vertikal harus sejalan dengan Renstra BPS RI, yang telah disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Muatan Renstra BPS yang disusun meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPS yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPS dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Dalam Renstra tersebut terdapat 4 (empat) tujuan strategis yang harus dicapai BPS yaitu: (1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan; (2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN; (3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, sebagai lembaga pemerintah yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka BPS Kabupaten Bandung wajib menyampaikan Laporan Kinerja yang disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian BPS Kabupaten Bandung menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang merupakan gambaran kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan kinerja

pencapaian target sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Selain untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maksud penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Bandung atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama tahun 2022.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung merupakan lembaga non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah dibentuk Instansi vertikal BPS yang terdiri atas: BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, kedudukan BPS Kabupaten diatur sebagai berikut:

- (1) BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
- (2) BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas

BPS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

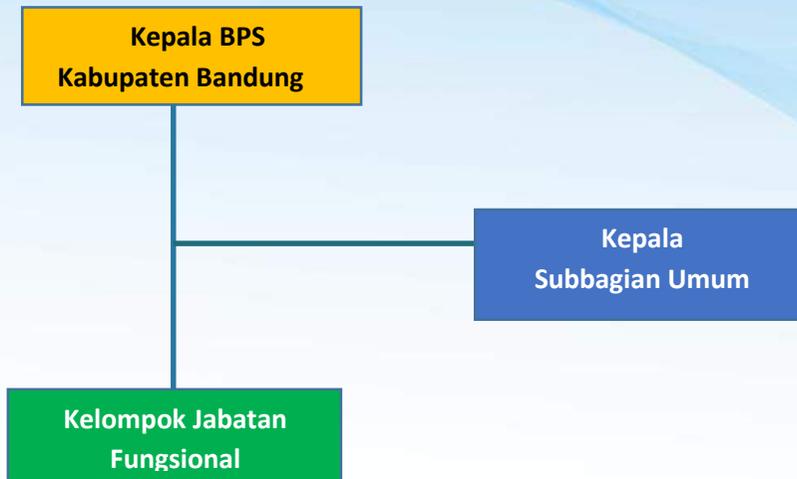
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabupaten Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Bandung;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Bandung;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Bandung;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten Bandung.

Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, yaitu :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Bandung

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BPS KABUPATEN BANDUNG DAN DUKUNGAN ANGGARAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menunjang kegiatannya, BPS Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Pejabat Administrator/Eselon III yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian/pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan kegiatan statistik dasar, Kepala BPS Kabupaten Bandung dibantu oleh beberapa orang pejabat fungsional dari kelompok jabatan fungsional tersebut, yang ditunjuk sebagai Ketua Tim, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua Tim Statistik Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Ketua Tim Statistik Produksi;
3. Ketua Tim Statistik Harga dan SBH;
4. Ketua Tim Neraca Produksi dan Pengeluaran;
5. Ketua Tim Integrasi Pengolahan;
6. Ketua Tim Pelaksana Statistik Ketahanan Sosial dan Potensi Desa;
7. Ketua Tim Pelaksana Statistik Industri;

8. Ketua Tim Pelaksana Statistik Distribusi dan Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata;
9. Ketua Tim Pelaksana Analisis Statistik & Lintas Sektor dan Diseminasi Statistik.

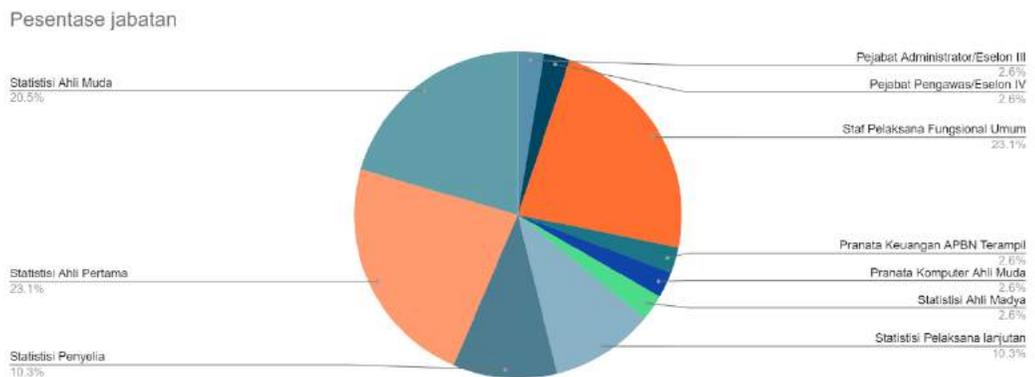
Pada tahun 2022, dari total pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPS Kabupaten Bandung sebanyak 39 orang, jika dibagi berdasarkan Jabatan Pegawai adalah terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 2 orang (5,88%), Pejabat Fungsional sebanyak 28 orang (79,41%) dan Pejabat fungsional umum/staf pelaksana sebanyak 9 orang pegawai (14,71%). Selain pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, di BPS Kabupaten Bandung masih terdapat 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau Honorer yang difungsikan sebagai tenaga Pramubakti dan Satuan Pengamanan kantor.

Tabel 1. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase terhadap jumlah ASN (%)
1	Pejabat Administrator/Eselon III	1	2.6
2	Pejabat Pengawas/Eselon IV	1	2.6
3	Staf Pelaksana Fungsional Umum	9	23
4	Kelompok Jabatan Fungsional	28	
-	<i>Pranata Keuangan APBN Terampil</i>	1	2.6
-	<i>Pranata Komputer Ahli Muda</i>	1	2.6
-	<i>Statistisi Ahli Madya</i>	1	2.6
-	<i>Statistisi Pelaksana lanjutan</i>	4	10,3
-	<i>Statistisi Penyelia</i>	4	10,3
-	<i>Statistisi Ahli Pertama</i>	9	23
-	<i>Statistisi Ahli Muda</i>	8	20.4

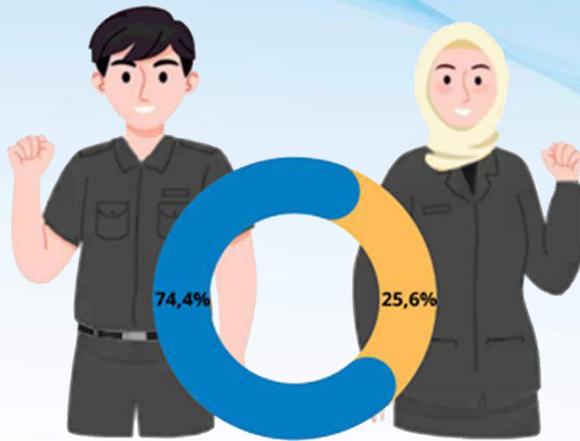
Jumlah pegawai yang menjabat dalam Jabatan Ketua Tim di BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, disebabkan karena adanya Penyetaraan Jabatan Fungsional tertentu dari pejabat struktural Eselon IV (9 orang Ketua Tim), serta adanya Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional Statistisi dan Pranata Keuangan APBN. Selain peningkatan jumlah pegawai dalam jabatan fungsional tertentu, pada tahun 2022 terdapat juga penambahan 2 jenis fungsional tertentu, yaitu Fungsional Pranata Komputer dan Pranata Keuangan APBN.

Dari sebanyak 28 orang pegawai yang termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional tersebut, 1 orang pegawai (2,6%) merupakan Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 orang (2,6%) merupakan Pranata Komputer Ahli Muda, 1 orang pegawai (2,6%) merupakan Statistisi Madya, 4 orang pegawai (10,3%) merupakan statistisi Mahir/Pelaksana Lanjutan, 4 orang pegawai (10,3%) merupakan statistisi Mahir/Penyelia, 9 orang pegawai (23%) merupakan Statistisi Ahli/Pertama dan 8 Orang Pegawai (20,4%) merupakan Statistisi Ahli/Muda.

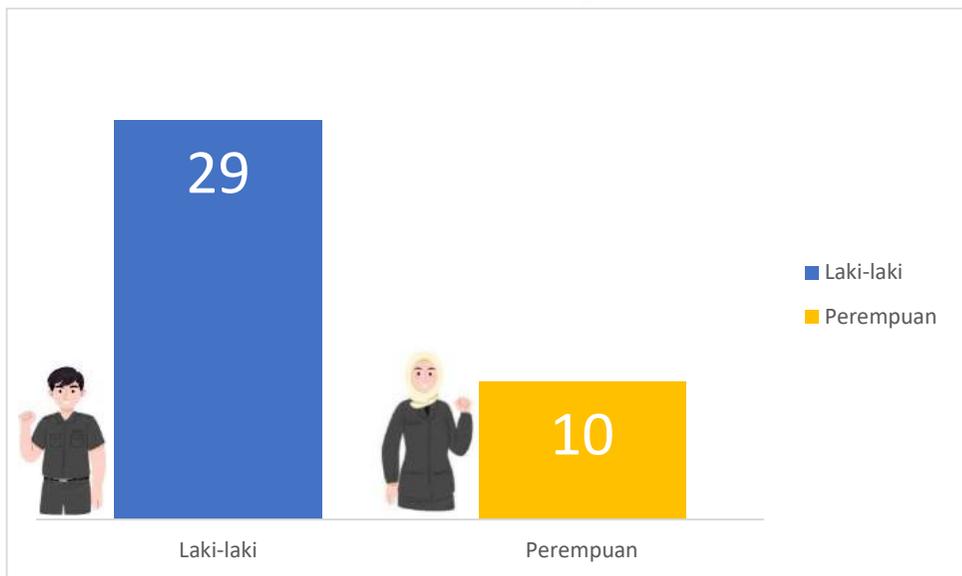


Gambar 2. Persentase Pejabat Fungsional Tertentu Menurut Jenjang Jabatan Fungsional

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu sebanyak 29 orang pegawai atau sebesar 74,4% dari total 39 orang pegawai. Sementara itu pegawai perempuan tercatat sebanyak 10 orang pegawai atau sebesar 25,6% persen dari total seluruh pegawai.



Gambar 3. Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin



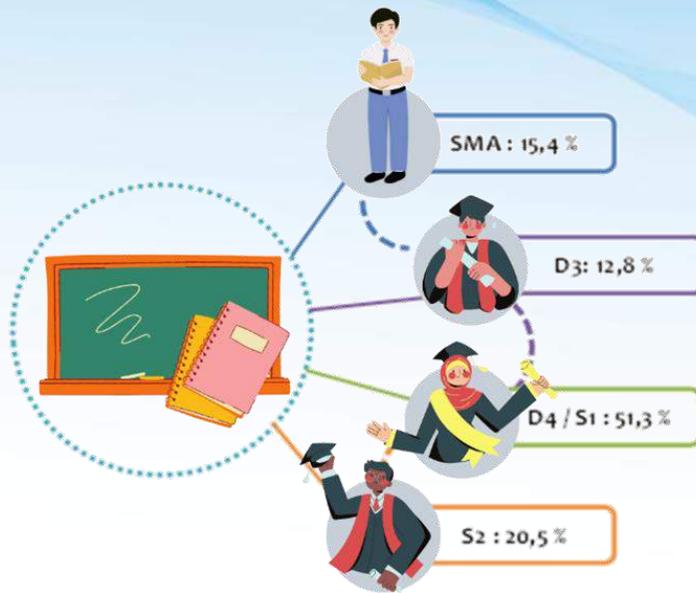
Gambar 4. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jenis Kelamin

Ditinjau dari tingkat pendidikan pada Tahun 2022, sebagian besar pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Sebanyak 8 orang pegawai (20,5%) berlatar belakang pendidikan magister (S-2), 20 orang pegawai (51,3%) dengan tingkat pendidikan sarjana atau Diploma IV (DIV/S-1), 5 orang pegawai (12,8%) dengan tingkat pendidikan diploma-3 (D-III), 6 orang pegawai (15,4%) berpendidikan SMA.

**Tabel 2. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung
Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang) Tahun 2022	Jumlah (orang) Tahun 2021
1	SMA	6	6
2	D III	5	3
3	D-IV / S-1	20	18
4	S-2	8	7
	Jumlah	39	34

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 ini ada perubahan untuk Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan yaitu pada tahun 2021 berjumlah 34 orang menjadi berjumlah 39 orang di tahun 2022. Ada pergeseran jumlah untuk beberapa Tingkatan Pendidikan pada tahun 2022. Untuk Tingkat Pendidikan D III pada tahun 2021 berjumlah 3 orang dan pada tahun 2022 berjumlah 5 orang, penambahan ini terjadi dikarenakan terdapat 2 orang pegawai Pengangkatan CPNS. Selain itu terjadi pula peningkatan jumlah pada Tingkatan Pendidikan D-IV / S-1 pada tahun 2021 berjumlah 18 orang dan pada tahun 2022 berjumlah 20 orang, ini terjadi dikarenakan terdapat 1 orang pegawai yang pensiun dan mutasi masuk sebanyak 3 orang. Dan untuk tingkat pendidikan S-2 terjadi penambahan, pada tahun 2021 berjumlah 7 orang dan pada tahun 2022 menjadi 8 orang.



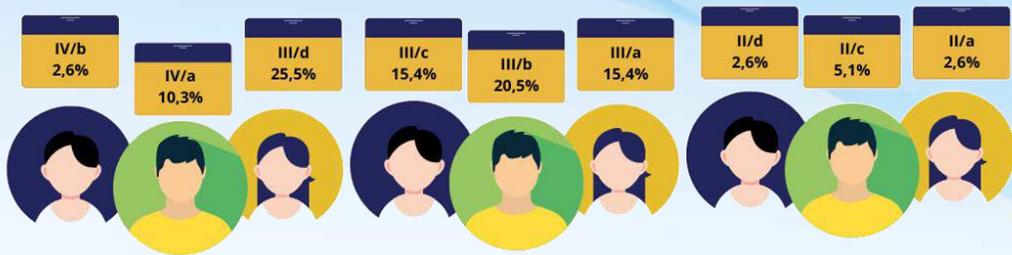
Gambar 5. Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai BPS Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dan ruang, yaitu Pegawai Golongan IV berjumlah 5 orang terdiri dari Pembina Tingkat I (IV/b) sebanyak 1 orang pegawai dan Pembina (IV/a) sebanyak 4 orang. Sedangkan Pegawai Golongan III terdapat sebanyak 30 orang yang terdiri dari : Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 10 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 8 orang dan Penata Muda (III/a) sebanyak 6 orang pegawai. Adapun untuk Pegawai Golongan II sebanyak 4 orang, dengan rincian : Pengatur Tingkat I (II/d) sebanyak 1 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 2 orang dan Pengatur Muda (II/a) sebanyak 1 orang.



Gambar 6. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang

Berdasarkan komposisi tersebut terlihat bahwa pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dan pangkat Penata Tingkat I (III/d) merupakan pangkat/golongan ruang dengan jumlah pegawai terbanyak di BPS Kabupaten Bandung yaitu masing-masing sebesar 20,5% dan 25,5%, disusul dengan Penata (III/a) dan Penata Muda (III/c) yaitu masing-masing sebanyak 15,5% dan 15,5%, Pembina (IV/a) sebanyak 10,3%, Pengatur (II/c) sebanyak 5,1% dan Pembina Tingkat I (IV/b), Pengatur Tingkat I (II/d) dan Pengatur Muda (II/a), yaitu sebesar 2,6%. Dibandingkan dengan tahun lalu Jumlah ASN dengan golongan ruang IV/b bertambah 1 orang, golongan ruang III/b bertambah 1 orang, golongan ruang III/c bertambah 1 orang, golongan ruang III/b bertambah 1 orang dan golongan II/c bertambah 2 orang.



Gambar 7. Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang

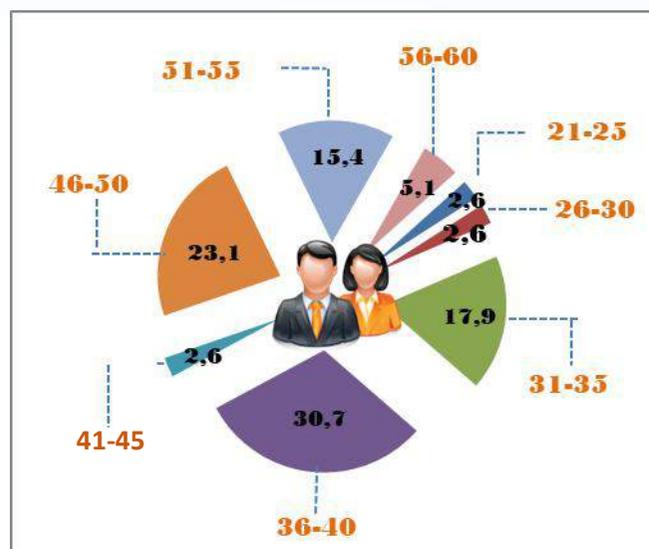
Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, Untuk pegawai menurut kelompok umur di lingkungan BPS Kabupaten Bandung terbanyak berada pada kelompok umur 31-35 tahun, 36-40 tahun dan 46-50 tahun yaitu masing-masing sebanyak 8 orang atau 23,5% dari total pegawai, diikuti oleh kelompok umur 51-55 tahun sebanyak 5 orang atau 14,7%, kelompok umur 41-55 tahun dan 56-60 tahun yaitu masing-masing sebanyak 2 orang atau sebesar 5,9% dan kelompok umur 21-25 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 3%.

Tabel 3. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	21-25	1	-	1
2	26-30	1	-	1
3	31-35	2	5	7
4	36-40	9	3	12
5	41-45	1	-	1
6	46-50	7	2	9
7	51-55	6	-	6
8	56-60	2	-	2
	Jumlah	29	10	39

Secara keseluruhan sebagian besar pegawai BPS Kabupaten Bandung berada pada kelompok umur di bawah 50 tahun yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 79,4 %. Jika dilihat dari Struktur Umur berdasarkan Generasi maka di BPS Kabupaten Bandung

didominasi oleh Generasi Milenial (lahir tahun 1981 – 1996 atau perkiraan usia sekarang 25 - 40 tahun) yaitu sebanyak 21 orang, diikuti oleh Generasi X (lahir tahun 1965 – 1980 atau perkiraan usia sekarang 41-56 tahun) yaitu sebanyak 16 orang, Generasi Baby Boomer (lahir tahun 1946 – 1964 atau perkiraan usia sekarang 57-75 tahun) yaitu sebanyak 2 orang dan Generasi Z (lahir tahun 1997 – 2012 atau perkiraan usia sekarang 9 - 24 tahun) yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini menjadi potensi SDM yang menggembirakan karena secara fisik relatif muda sehingga memiliki potensi yang besar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja satker BPS Kabupaten Bandung.



Gambar 8. Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur

Pada tahun awal tahun sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat pegawai di BPS Kabupaten Bandung yang mengalami mutasi, baik mutasi kenaikan Pangkat dan Golongan maupun mutasi kenaikan jabatan Fungsional. Rincian para pegawai yang mengalami mutasi secara lengkap seperti pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Daftar Mutasi Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022

No	Nama	Jenis Mutasi Kepegawaian	Jabatan lama/ Pangkat Gol. Lama	Jabatan Baru/ Pangkat Gol. Baru	T M T
1	Peri Gandara, S.Si, M.Eng, MT	Jabatan Staf	Statistisi Pertama pada Fungsi Statistik Produksi	Statistisi Pertama pada Fungsi Statistik Distribusi	01/01/2022
2	Neng Susilawati, A.Md	Jabatan Staf	Staf Pelaksana Subbagian Umum	Staf Pelaksana Fungsi Statistik Produksi	01/01/2022
3	Dewi Rajaeti	Jabatan Staf	Statistisi Pelaksana Lanjutan Fungsi Statistik Produksi	Statistisi Pelaksana Lanjutan Fungsi Statistik Sosial	01/01/2022
4	Dani Wildan Hakim, S.Si, M.E	Jabatan Staf	Statistisi Pertama Koordinator Statistik Kecamatan Paseh	Statistisi Pertama Koordinator Statistik Kecamatan Paseh diperbantukan pada Fungsi Statistik Produksi	01/01/2022
5	Pungky Adhitya, A.Md	Pengangkatan CPNS	-	CPNS / Pelaksana/Terampil Statistisi	01/03/2022
6	Firmansyah Saragih, A.Md	Pengangkatan CPNS	-	CPNS / Pelaksana/Terampil Statistisi	01/03/2022
7	Indra, SAP	Penugasan Fungsional	Jabatan KSK Margahayu	Staistisi Pertama	01/03/2022
8	Neng Susilawati, A.Md	Penugasan Fungsional	Jabata Staf Pelaksana Fungsi Statistik Produksi	Pranata Komputer Mahir	01/03/2022
9	Rahmat Burhani, S.Sos	Penugasan Fungsional	Jabatan Staf Pelaksana Subbag Umum	Analisis pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	01/03/2022

10	Koko Anggi Purnomo, S.Si.	Kenaikan Pangkat	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)	01/04/2022	
11	Ikin Sodikin	Kenaikan Pangkat	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	01/04/2022	
12	Pungky Adhitya, A.Md	Mutasi Masuk CPNS - Penugasan Jabatan Fungsional		CPNS-Statistisi Terampil Fungsi Statistik Produksi	02/06/2022	
13	Firmansyah Saragih, A.Md	Mutasi Masuk CPNS - Penugasan Jabatan Fungsional		CPNS-Statistisi Terampil Fungsi Statistik Produksi	02/06/2022	
14	Pungky Adhitya, A.Md	Jabatan Staf	Pelaksana-Terampil Statistisi Fungsi Statistik Produksi	Staf Pelaksana Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	07/06/2022	
15	Firmansyah Saragih, A.Md	Jabatan Staf	Pelaksana-Terampil Statistisi Fungsi Statistik Produksi	Staf Pelaksana Fungsi Statistik Distribusi	07/06/2022	
16	Nurdianto Zaenuridin S.Si.,M.T	Jabatan Staf	Statistisi Pertama Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Statistisi Pertama Fungsi Statistik Produksi	07/06/2022	
17	Neng Susilawati, A.Md	Jabatan Staf	Staf Pelaksana Fungsi Statistik Produksi	Staf Pelaksana Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	07/06/2022	
18	Warsa Kartika, S.Sos	Mutasi Satker	Masuk-Pindah	Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Bandung Barat	Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Bandung	01/08/2022
19	Alex Firmansyah, S.ST	Mutasi Satker	Masuk-Pindah	Statistisi Muda Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Aceh Barat	Pelaksana BPS Kabupaten Bandung	01/09/2022

20	Krido Saptono, S.Si.,M.Si	Mutasi Satker	Masuk-Pindah	Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Barat	Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Bandung	01/10/2022
21	Yayat Hidayat, S.Sos	Mutasi Keluar - Pensiun		Statistisi Penyelia	Pensiun	01/11/2022
22	Dewi Pertiwi Sitorus, SST	Mutasi Satker	Masuk-Pindah	Statistisi Ahli Pertama BPS Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksana BPS Kabupaten Bandung	01/12/2022

DUKUNGAN ANGGARAN

Keberhasilan pencapaian target kinerja sangat didukung oleh anggaran yang diberikan untuk satker BPS Kabupaten Bandung. Bentuk dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program kegiatan yang berada di BPS Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen (Dukman)
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Tabel 5. Jumlah Anggaran Menurut Program Kegiatan BPS Kabupaten Bandung 2022

No	Program	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)	Rp. 5.703.402.000,-
2.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	Rp. 51.332.402.000,-

POTENSI DAN PERMASALAHAN

BPS Kabupaten Bandung merupakan instansi vertikal BPS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. BPS Kabupaten Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum BPS Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini menjadi kekuatan bagi BPS khususnya BPS Kabupaten Bandung untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia dan untuk menjalankan peran pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, BPS Kabupaten Bandung telah menandatangani Perjanjian Kerjasama bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Diskominfo) Kabupaten Bandung, dengan Judul Kerjasama : ***Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka mewujudkan Satu Data*** pada tanggal 16 Februari 2021 dengan No PKS : Nomor 480/120 Diskominfo dan Nomor B-047/BPS/3204/02/2021 dan Penandatanganan Nota kesepahaman bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung (Bupati Bandung) tentang ***Penyusunan Statistik*** pada tanggal 4 Mei 2021 dengan Nomor MOU 119/010-Ksm/2021 dan B-119.1/BPS/3204/05/2021. Adanya payung hukum ini kemudian menjadi salah satu kekuatan (*strength*) yang dimiliki BPS Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan

kegiatan perstatistikan terutama hubungannya terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil Survei Kebutuhan Data 2022 menunjukkan sebagian besar konsumen di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bandung menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 97 persen, sementara pengguna yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional terhitung sebanyak 94 persen. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan pengguna terhadap data BPS.

Tantangan yang dihadapi BPS Kabupaten Bandung saat ini adalah peningkatan peran BPS sebagai pembina urusan statistik, permasalahan yang dihadapi BPS adalah bagaimana cara meningkatkan serta mempertahankan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna data. Tantangan lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah posisi Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu kabupaten/kota dengan wilayah terhitung luas di Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya tercatat sebesar 1.762,4 km² dan terdiri dari 31 kecamatan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Bandung terhitung sebanyak 3.718.660 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah penduduk kedua terbesar di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar menjadikan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan perstatistikan di BPS Kabupaten Bandung.

Tahun 2022 merupakan tahun istimewa dimana berlangsung dua agenda besar secara berturut-turut yaitu *Long Form* Sensus Penduduk (LF SP2020) dan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Adanya beberapa kendala teknis khususnya pada aplikasi FASIH yang digunakan di kegiatan *Long Form* Sensus Penduduk (LF SP2020) begitu pula dengan persiapan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang terkesan mendadak namun tetap menuntut SOP dan administrasi yang cermat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pada akhirnya kegiatan *Long Form* Sensus Penduduk (LF SP2020) dan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tetap terlaksana dengan tetap berpedoman pada SOP dalam pelaksanaan kegiatan lapangannya.

Di samping kegiatan besar Long Form Sensus Penduduk (LF SP2020) dan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), berbagai kegiatan rutin lainnya tetap berjalan. Target pencacahan dan pemasukan dokumen berbagai kegiatan di BPS Kabupaten Bandung semakin tinggi setiap tahunnya. Di sisi lain, semakin banyak survei yang dilakukan BPS konsekuensinya adalah responden yang enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Kunjungan yang berulang pada satu responden untuk berbagai survei dapat membuat responden bosan dan bahkan menolak untuk didata sehingga berdampak pada *response rate* atau tingkat pemasukan dokumen survei.

Di tengah tantangan yang semakin beragam, kualitas data yang dihasilkan oleh BPS selama ini sudah tentu tetap menjadi prioritas dan tanggung jawab semua. Berbagai strategi dilakukan demi terciptanya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kabupaten Bandung disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung
- Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran
- Potensi dan Permasalahan
- Sistematika Penyajian Laporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung
- Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung
- Perjanjian Kinerja BPS Provinsi/Kab/Kota

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

- Analisis capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung
 - Realisasi dan capaian kinerja tahun T
 - Perbandingan capaian kinerja total tahun T sampai dengan T-4;
 - Realisasi kinerja per IKU tahun T sampai dengan tahun pertama Renstra;
 - Realisasi kinerja per IKU tahun T terhadap target Renstra tahun T;
 - Realisasi kinerja per IKU tahun T terhadap target akhir Renstra;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.
 - Prestasi dan Inovasi Satker Tahun T.
- Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun T
- Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran
 - Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran
 - Upaya Efisiensi Anggaran (penggunaan sumber daya) dan Nilai Efisiensi Anggaran (diambil dari FRA)

Bab IV. Penutup

- Kesimpulan
- Rencana Tindak Lanjut

02

PERENCANAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPS KABUPATEN BANDUNG



BPS Kabupaten Bandung berupaya turut serta berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik guna mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi yang disusun BPS Kabupaten Bandung untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Visi tersebut mengandung makna bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Visi tersebut kemudian dirumuskan menjadi misi BPS dengan uraian sebagai berikut:

- **MISI 1**

- **Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional**

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi. Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas). Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*.

- **MISI 2**

- **Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan**

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan” (UU No. 16 Tahun 1997). BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik

nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

- **MISI 3**

- Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional**

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

- **MISI 4**

- Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.**

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin

(melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik.

Penetapan tujuan kemudian dirumuskan guna mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Kabupaten Bandung. Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

		MISI BPS 2020 -2024
VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 	

Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan

digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN. Tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS sebagai pusat rujukan statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Tujuan keempat, yaitu penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan;
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)

Sasaran Strategis 2: Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN.

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)
- b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)

Sasaran Strategis 3: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)

Sasaran Strategis 4: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPS KABUPATEN BANDUNG 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung untuk tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, serta arahan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis BPS Kabupaten Bandung didasarkan pada Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Renstra BPS Kabupaten Bandung periode 2020-2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020--2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020-2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni :

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020-2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Kabupaten Bandung 2020-2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia (STATCAP CERDAS)*.

Tabel 6. Target Kinerja pada Renstra BPS Kabupaten Bandung 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan (%)	75	92	92	92	93

	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	-	-	100	100	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN						
2.1.Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	25	25	30
	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	-	-	50	55	60

T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	-	-	90	90	95
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi						
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	61,2	69,5	69,5	70	70,5
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	75	75	93	93	94

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Kabupaten Bandung 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran di BPS Kabupaten Bandung. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS Kabupaten Bandung perlu menyadari tentang pentingnya komitmen untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang

tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS Kabupaten Bandung optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Kabupaten Bandung 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020-2024.

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) BPS KABUPATEN BANDUNG 2022

Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen BPS Kabupaten Bandung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja. Penetapan target tahunan dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada awal tahun 2022, BPS kabupaten Bandung telah menetapkan Target Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang harus dicapai selama satu tahun ke depan. Target Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	92
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	25
	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menyampaikan metadana sektoral sesuai standar	Persen	50
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	90
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	69,5
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	93

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring dan dilaporkan sebagai laporan interim (triwulanan) setiap triwulanan dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Halaman ini sengaja dikosongkan

03

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN BANDUNG

CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Laporan kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja selama pada tahun 2022. BPS Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 (empat) tujuan yang tertuang dalam 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra tahun 2020- 2024. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dan ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahunnya



Sepanjang tahun 2022, terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Bandung yaitu :

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

**Tabel 8. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja 2022
BPS Kabupaten Bandung**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	92	94,44	102,65
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	100	100	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	25	25	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	50	50	100

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	90	90	100
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
4.1 SDM yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Statistik Hasil penilaian implementasi SAKIP	Poin	69,5	74,94	107,83
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	93	98,48	105,89
Rata-rata Capaian Kinerja Total					102,34

Secara umum, pencapaian tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya mencapai hasil yang optimal. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran dapat dicapai dengan baik. Dengan rata-rata capaian kinerja total sebesar 102,34 persen. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain semakin meningkatnya pencapaian pada pemanfaatan data statistik yang berkualitas (101,33%) dan peningkatan pada SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam rangka tata kelola kelembagaan (106,86%).

Sebuah organisasi yang baik dituntut memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan guna meningkatkan standar kinerja di semua aspek demi tercapainya pengembangan organisasi. Sebagai konsekuensi dari standar yang meningkat ini, organisasi harus mampu melakukan monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk

memperkuat kemampuan strategisnya. Keberhasilan capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung yang melebihi target merupakan hasil komitmen dan kerjasama dari seluruh organik BPS Kabupaten Bandung bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung. Tingkat capaian kinerja ini juga memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung telah sesuai dengan program, anggaran, kebijakan, sasaran, tujuan serta prosedur yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS Kabupaten Bandung.

Sebagai salah satu upaya mencapai perbaikan kinerja organisasi selanjutnya, BPS Kabupaten Bandung terus berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat membangun untuk meningkatkan standar kinerja di semua aspek demi tercapainya pengembangan organisasi.

CAPAIAN KINERJA TUJUAN PERTAMA

Tujuan pertama adalah *“Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan”*, yang dicapai melalui sasaran strategis, *“Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas”* dengan didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi.

Kedua indikator ini mencerminkan penilaian konsumen terhadap kualitas data statistik (BPS) yang dihasilkan yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik.

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan

pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.

Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	
1.1.1 Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	102,65
1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1.1	101,33

Pada tahun 2022, pencapaian sasaran strategis tercatat mencapai 101,33 persen. Hal ini didorong pencapaian kedua indikator pada sasaran strategis ini yang berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dan usaha dari semua pihak dalam hal ini semua bidang-bidang teknis yang didukung dengan pengelolaan administrasi yang tepat sehingga dapat mencapai nilai realisasi yang optimal.

Sebagai catatan pencapaian sasaran ini pada tahun sebelumnya terbilang tidak optimal yaitu disekitar 88,36 persen. Perbaikan yang dilakukan pada tahun ini adalah melakukan analisis karakteristik konsumen sehingga sasaran pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian perbaikan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya adalah dengan tetap mempertahankan pola yang telah sesuai dan terus meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai target yang optimal.

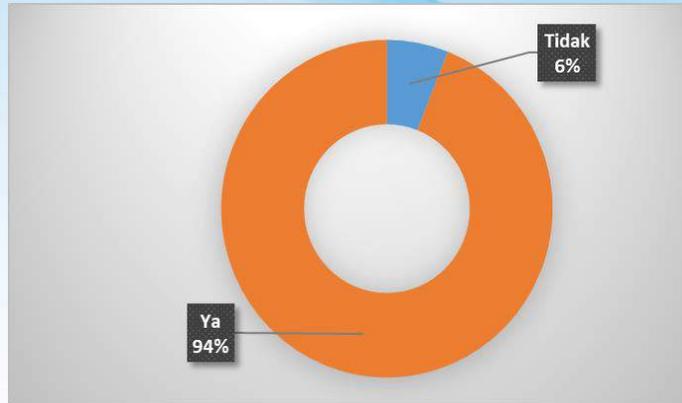
Lebih lanjut capaian kinerja dari indikator-indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis pertama dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.1.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.1.1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	92	94,44	102,65
Jumlah Publikasi Statistik yang Terbit Tepat Waktu	Publikasi	37	37	100
Jumlah Rilis data statistik yang tepat waktu	Rilis	-	-	-
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	28.000	83.789	120

Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pertama “*persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional*” telah tercapai dengan sangat baik, yaitu sebesar 102,65 persen.

Pencapaian ini diwujudkan dalam bentuk Survei Kepuasan Data Tahun 2022 (SKD 2022 yang dilaksanakan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bandung pada bulan Mei hingga Juli 2022 dimana konsumen yang menjadi responden adalah konsumen yang menerima pelayanan pada 1 Januari 2022 sampai dengan periode akhir pencacahan.



Gambar 9. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Bandung yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan

Hasil SKD 2022 BPS Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa 94,44 persen konsumen yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

Tidak dipungkiri, salah satu kendala pada pencapaian IKU ini adalah nilai capaian setiap tahunnya sangat bergantung pada jumlah dan persepsi konsumen yang berkunjung ke fasilitas pelayanan terpadu (PST) BPS Kabupaten Bandung. Strategi yang dilakukan oleh BPS diantaranya adalah terus dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang baik dan benar terkait survei kebutuhan data. Kemudian guna meningkatkan pencapaian pada tahun-tahun berikutnya arahan dan bimbingan akan terus diberikan kepada pengguna data khususnya para OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bandung untuk dapat menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di sektornya masing-masing.

Lebih lanjut pencapaian tujuan pada IKU ini digambarkan juga dari jumlah publikasi yang terbit dan rilis tepat waktu dan jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS. Dimana kedua komponen ini berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Pada indikator komponen *“jumlah publikasi yang terbit dan rilis tepat waktu”*, secara umum seluruh publikasi yang ditargetkan rilis oleh BPS Kabupaten Bandung, yaitu sebanyak 37 publikasi, telah berhasil dirilis tepat waktu, walaupun pada penyusunannya mengalami beberapa kendala seperti respon dari OPD yang terbilang masih rendah atas permintaan data sektoral pendukung penyusunan publikasi. Strategi yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kerja sama dengan Diskominfo dan Bappelitbangda dalam menghimpun data-data sektoral yang dibutuhkan dalam penyusunan publikasi.

Sementara untuk indikator komponen *“jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS”* tercapai sebesar 120 persen. Diyakini bahwa jumlah pengunjung yang mengunjungi website BPS bergantung pada banyaknya informasi yang bisa ditampilkan. Strategi yang dilakukan kemudian adalah meningkatkan kompetensi SDM khusus yang fokus untuk meningkatkan wajah website BPS Kabupaten Bandung sehingga membuat jumlah pengunjung lebih banyak yang mengakses seperti konten tambahan, pengumuman-pengumuman rekrutmen, infografis, tabel-tabel dll.

Sementara itu pencapaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua yaitu *“persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan”* diwujudkan dalam bentuk publikasi statistik yang tercapai sebanyak 6 publikasi dari target 6 publikasi. Publikasi tersebut diantaranya adalah PDRB Menurut Lapangan Usaha, PDRB Menurut Pengeluaran, Statistik Daerah, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Kecamatan Dalam Angka 2022.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.2

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100	100	100
Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi	Jumlah	6	6	
Jumlah target publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi	Jumlah	6		

Secara umum seluruh publikasi berhasil dirilis tepat waktu, walaupun beberapa penyusunan publikasi menghadapi kendala teknis diantaranya adanya surat perbaikan data dari BPS pusat untuk publikasi Statistik Kesra, setelah publikasi di *upload* ke portal publikasi. Solusi yang dilakukan adalah melakukan perbaikan sesegera mungkin sehingga data dapat diperbaiki sebelum publikasi rilis di website BPS Kabupaten Bandung.

Sementara kendala untuk publikasi nerwilis diantaranya adalah kondisi data pendukung, untuk penyusunan PDRB maupun untuk publikasi lainnya belum semua siap. Strategi yang dilakukan kemudian diantaranya adalah penyusunan angka PDRB menggunakan data sementara yang tersedia, ataupun melakukan pengupdatean data untuk publikasi-publikasi selanjutnya.

Sama halnya dengan publikasi nerwilis, kendala pada publikasi IPDS adalah masih terkendala data-data yang lengkap dan mutakhir pada penyusunan Publikasi DDA. Strategi yang dilakukan kemudian adalah dengan meningkatkan fungsi koordinatif dengan walidata dan produsen data.

CAPAIAN KINERJA TUJUAN KEDUA

Tujuan kedua, yaitu *“Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN”*, dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu *“Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN”*, melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

- a) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik;
- b) Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Tabel 12. Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan: Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Capaian Kinerja (%)
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	
2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	
2.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100
2.1.2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2.1	100

Pada lingkup BPS Kabupaten Bandung, rata-rata capaian sasaran strategis kedua tercatat sebesar 100 persen, yang berarti sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil ini diperoleh dengan tercapainya target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik, dan terkumpulnya metadata statistik sektoral sesuai standar yang menjadi target BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2022.

Tantangan yang dihadapi pada pencapaian sasaran strategis ini adalah masih rendahnya kesiapan maupun respon dari pada produsen data. Beberapa strategi yang mendukung pencapaian tersebut, adalah:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS
- b) Pengoptimalan dalam koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya dengan Walidata dan Sekretariat SDI terkait kegiatan statistik sektoral

Kemudian perbaikan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya adalah dengan tetap mempertahankan kerjasama yang terjalin dengan baik dan terus meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai target yang optimal.

Lebih lanjut capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis kedua dapat dilihat pada tabel 13 berikut

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.1.1

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	25	25	100
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistic	Jumlah	4	4	
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan	Jumlah	16		

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “*Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik*” adalah sebesar 100 persen. Terhitung sebanyak 4 OPD dari target 4 OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan

statistik (kegiatan survei) adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Ciparay.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah kesiapan para produsen data dalam melaporkan kegiatan statistik sektoral yang terbilang masih rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya adalah pengoptimalan dalam melakukan koordinasi dengan walidata dan sekretariat SDI terkait kegiatan statistik sektoral.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.1.2.

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2.1.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	50	50	100
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Jumlah	14	14	
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kegiatan statistik	Jumlah	28		

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua dalam tujuan kedua tercapai dengan hasil optimal yaitu sebesar 100 persen. Terhitung sebanyak 14 OPD dari target 14 OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar adalah (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, (4) Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bandung, (5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung, (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (7) Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bandung, (8) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, (9) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, (10) Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bandung, (11) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, (12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bandung, (13) Pemerintah Kecamatan Ciparay, dan (14) Pemerintah Kecamatan Ibun.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan kinerja kedua diantaranya adalah beberapa SKPD belum mempunyai persepsi yang sama tentang metadata, sehingga instansi/OPD yang menjadi objek pengumpulan data belum memberikan penjelasan terkait kegiatan statistik yang dilaksanakan. Disinilah peran BPS harus terus digiatkan untuk terus berupaya melaksanakan pembinaan statistik sektoral secara berkesinambungan sehingga akan tercipta pemahaman OPD terkait manfaat dari kegiatan pelaporan kegiatan statistik di sektornya masing-masing. Koordinasi yang intens terutama dengan Dinas Kominfo akan menjadi wadah untuk menjembatani terlaksananya pembinaan statistik dengan semua OPD dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Bandung.

Perbaikan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar adalah dengan tetap mempertahankan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dan melakukan sosialisasi yang lebih intens dengan OPD Pemerintah Kabupaten Bandung.

CAPAIAN KINERJA TUJUAN KETIGA

Tujuan ketiga adalah *“Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”*, dengan sasaran strategis *“Penguatan statistik sektoral K/L/D/I”*, diukur dengan indikator *“Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik”* dimana pembinaan statistik yang dimaksud dalam hasil ini adalah pembinaan statistik sektoral.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Capaian sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung untuk indikator yang mengukur tujuan ketiga tercapai dengan baik yaitu sebesar 100 persen, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan: Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Capaian Kinerja (%)
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	
3.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistic	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3.1	100

Pencapaian pada sasaran strategis ini dapat mencapai 100 persen berkat dilakukannya sosialisasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, disamping juga meningkatkan fungsi koordinatif dari walidata. Lebih lanjut perbaikan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya adalah dengan tetap mempertahankan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Lebih lanjut capaian kinerja IKU BPS Kabupaten Bandung untuk indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut juga tercapai dengan baik, yaitu sebesar 100 persen, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.1.1.

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
3.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	90	90	100
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Jumlah	18	18	
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik	Jumlah	20		

Sebanyak 18 OPD dari target 18 OPD telah mendapatkan pembinaan statistik. K/L/D/I yang telah mendapatkan pembinaan statistik meliputi (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, (5) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, (6) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung, (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (8) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, (9) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, (10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung (Kajian Penyusunan Database Perikanan), (11) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung, (12) Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bandung, (13) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, (14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bandung, (15) Pemerintah Kecamatan Ciparay, (16) Pemerintah Kecamatan Rancaekek, (17) Pemerintah Kecamatan Kutawaringin, dan (18) Pemerintah Kecamatan Ibun.

Kendala pada pencapaian IKU ini adalah masih terbatasnya SDM yang paham dengan statistik terutama dari pihak produsen data. Strategi yang dilakukan pun serupa yaitu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan juga meningkatkan fungsi koordinatif walidata. Pola ini akan terus dilakukan untuk menggenjot peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

CAPAIAN KINERJA TUJUAN KEEMPAT

Tujuan keempat adalah “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, tujuan ini diukur melalui sasaran strategis “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”, dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

- a) Hasil Penilaian Implementasi SAKIP;
- b) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

**Tabel 17. Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan:
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi**

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Capaian Kinerja (%)
4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	
4.1 SDM Statistik Yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan	
4.1.1 Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	107,83
4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	105,89
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4.1	106,86

Sasaran strategis ini dicapai dari 2 (dua) indikator yakni Hasil Penilaian Implementasi SAKIP dengan capaian kinerjanya sebesar 107,83 persen dan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS yang mencapai

105,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan keempat dapat tercapai dengan sangat baik.

Meskipun demikian, seluruh jajaran BPS Kabupaten Bandung tidak boleh cepat berpuas diri dan harus terus meningkatkan lagi kualitas, baik kualitas permintaan laporan, bukti kegiatan, dokumen pendukung SAKIP, maupun kualitas pelayanan sarana dan prasarana BPS yang lebih baik dan berkesinambungan guna meningkatkan penilaian SAKIP maupun kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS di tahun-tahun berikutnya.

Lebih lanjut capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis keempat dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.1.1.

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4.1.1. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	69,5	74,94	107,83
4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	93	98,48	105,89

Nilai capaian pada IKU “*Hasil penilaian implementasi SAKIP*” adalah sebesar 107,83 persen. Nilai ini jauh melampaui target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Di sepanjang tahun 2022, Tim SAKIP BPS Kabupaten Bandung telah berupaya sebaik mungkin memenuhi segala kelengkapan dokumentasi kegiatan, seperti pada saat Hasil Desk Evaluation sementara dirilis, dimana catatan hasil evaluasi masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian dokumen pendukung sesuai, maka Tim SAKIP BPS Kabupaten Bandung segera menindaklanjuti pemenuhan dokumen sesuai dengan permintaan dokumen dan arahan dari inspektorat. Setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP, dikomunikasikan dan dibahas secara langsung dalam tim dengan arahan Kepala BPS Kabupaten Bandung.

Pencapaian untuk saat ini memang sudah baik, namun hal ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi BPS Kabupaten Bandung untuk semakin membangun kinerja, meningkatkan kerja sama untuk kemajuan bersama, penyempurnaan sistem penguatan akuntabilitas kinerja, penyusunan dan penerapan sistem manajemen kinerja, sistem monitoring dan evaluasi serta penyusunan indikator kinerja untuk dapat diterapkan demi tercapainya kinerja instansi yang akuntabel dan terukur. Dengan demikian, sejalan dengan penerapan kerja dan pelaporan yang terstruktur dan tepat waktu dapat meningkatkan nilai SAKIP di masa mendatang.

Sementara untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) "*Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS*" tercapai sebesar 105,89 persen. Nilai realisasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian pada Survei Kepuasan Data (SKD) 2022 yang dihitung sebesar 98,48, atau dengan kata lain sebesar 98,48 persen konsumen puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana di PST BPS Kabupaten Bandung. Nilai ini melampaui target sebesar 93 persen yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi pada IKU ini adalah nilai capaian setiap tahunnya sangat bergantung pada jumlah dan persepsi konsumen yang berkunjung ke fasilitas Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bandung, Sehingga perlu dilakukan sosialisasi, khususnya kepada pengunjung PST, untuk meningkatkan pemahaman yang baik dan benar terkait Survei Kebutuhan Data.

CAPAIAN KINERJA PK SUPLEMEN

Perjanjian Kinerja Suplemen (PK Suplemen) adalah bagian dari Perjanjian Kinerja utama yang disusun untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dan sebagai dasar evaluasi untuk mengukur tolok ukur kinerja pegawai untuk beberapa kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Beberapa indikator yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Suplemen Tahun 2022 yaitu :

Tabel 19. Rencana Aksi Suplemen BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	Persen	98	99,19	101,21
Jumlah Desa Cinta Statistik (Desa Cantik)	Desa	2	2	100
Satker berpredikat WBK WBBM dari KemenPANRB	Satker	1	0	0
Persentase pelaporan dokumen melalui SPI <i>Online</i>	Persen	100	100	100
Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN	Persen	100	100	100
Terselenggaranya pengukuran Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Pemda	1	1	100
Rata-rata capaian kinerja PK Suplemen				83,54

Pencapaian capaian kinerja PK Suplemen sepanjang tahun 2022 terhitung sebesar 83,54 persen. Hampir seluruh indikator mencapai target, kecuali 1 (satu) indikator yang belum terealisasi dari total 6 (enam) indikator. Indikator tersebut adalah “Satker berpredikat WBK WBBM dari KemenPANRB”. Pada tahun ini, BPS Kabupaten Bandung belum dapat menjadi salah satu kabupaten/kota yang diajukan menjadi kabupaten WBK oleh inspektorat. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah pembentukan TIM WBK WBM, monitoring dan evaluasi kegiatan, pengumpulan bukti-bukti pendukung dan lain sebagainya. Strategi yang dilakukan adalah terus meningkatkan kinerja pelayanan, kerjasama dan komitmen dari seluruh jajaran BPS Kabupaten Bandung sebagai upaya perbaikan di tahun depan.

Lebih lanjut pencapaian indikator PK Suplemen yang telah terealisasi selama tahun 2022 adalah:

1. Indikator "*Persentase realisasi anggaran terhadap pagu*" memperoleh capaian kinerja sebesar 101,21 persen. Hal ini menggambarkan bahwa penyerapan anggaran di BPS Kabupaten Bandung sudah sangat baik. Walaupun sepanjang tahun 2022 ditemui beberapa kendala dalam hal penyerapan anggaran seperti perubahan jadwal kegiatan di luar RPD (Rencana Penarikan Dana) DIPA, kebijakan penghematan anggaran, adanya *Self Blocking Auto Adjustment* menyebabkan anggaran kegiatan berkurang, dan pada Triwulan III terjadi penurunan realisasi anggaran karena terjadi penambahan Pagu Regsosek yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 39.828.265.000. Akan tetapi, BPS Kabupaten Bandung terus berupaya mengatasi kendala yang dihadapi dengan melakukan revisi anggaran, penyesuaian RPD DIPA, percepatan realisasi anggaran Regsosek dan Rutin dari seluruh kegiatan Fungsi Statistik/Subbagian pada akhir anggaran. Di tahun depan, BPS Kabupaten Bandung akan terus memperbaiki sistem dan alur pengadministrasian, kemudian meningkatkan komitmen dan kerjasama, termasuk peningkatan kompetensi SDM yang berhubungan dengan administrasi keuangan.
2. Indikator "*Jumlah Desa Cinta Statistik (Cantik)*" di Kabupaten Bandung telah memenuhi target sebanyak 2 (dua) desa/kelurahan yaitu Desa Pangalengan dan Kelurahan Sulaiman. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan data di tingkat desa yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia. Kegiatan ini diperlukan koordinasi dan sinkronisasi proses kegiatan statistik serta peningkatan literasi statistik khususnya di jajaran aparat pemerintah desa yang merupakan subjek utama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan data yang baik di tingkat desa. Selain mencapai target, kegiatan pembinaan di salah satu desa cantik yaitu Desa Pangalengan juga berhasil masuk dalam 10 Desa Cantik Terbaik Tahun 2022 tingkat nasional, sementara Kelurahan Sulaiaman berhasil masuk dalam 12 besar Desa Cantik Terbaik tingkat Jawa Barat. Kendala yang dihadapi pada kegiatan Desa Cantik diantaranya adanya mutasi yang cukup sering di

Kelurahan Lanud Sulaiman sehingga menyulitkan pemilihan agen statistik. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pemilihan agen statistik dengan penuh pertimbangan.

3. Indikator "*Persentase pelaporan dokumen melalui SPI Online*" terealisasi sebesar 100 persen sesuai dengan target yang telah ditentukan. Beberapa kendala yang ditemui dalam memenuhi target pada indikator ini seperti perubahan/migrasi aplikasi mengakibatkan adanya kesulitan dalam meng-*upload backup* aplikasi (SAIBA, Persediaan, SIMAK); dan proses scan SPJ yang cukup banyak sehingga dilakukan penambahan SDM untuk memperlancar kegiatan melengkapi dokumen (bantuan dari siswa PKL). Pada tahun 2023, beberapa strategi akan dilakukan untuk mempercepat kegiatan melengkapi permintaan dokumen sehingga target pada indikator ini dapat terealisasi sesuai target atau lebih.
4. Indikator "*Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN*" dapat terealisasi 100 persen sesuai target karena seluruh pegawai BPS kabupaten Bandung adalah Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN telah melaporkan melalui aplikasi e-LHKPN dan SiHarka. Kegiatan ini relatif sudah berjalan cukup baik, tidak ditemukan kendala berarti, namun monitoring pengisian LHKPN dan LHKASN terhadap seluruh pegawai tetap dilakukan agar target tercapai.
5. Indikator "*Terselenggaranya pengukuran Indeks Pembangunan Statistik (IPS)*" juga dapat terealisasi sebanyak target yang telah ditetapkan yaitu 1 Pemerintah Daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari andil pegawai BPS Kabupaten Bandung yang tidak henti-hentinya mensosialisasikan pentingnya pembangunan statistik kepada OPD Kabupaten Bandung dan meningkatkan koordinasi dengan OPD secara intens karena BPS Kabupaten Bandung terkendala dengan masih rendahnya tingkat pemahaman OPD terkait data statistik sektoral. Strategi sosialisasi pembangunan statistik akan terus dilakukan setiap tahunnya agar setiap OPD di Kabupaten Bandung menjadi melek pembangunan statistik untuk membangun daerah.

REALISASI KINERJA BPS KABUPATEN BANDUNG TERHADAP TARGET RENSTRA 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung untuk tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, serta arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Capaian realisasi kinerja selain dibandingkan terhadap target Perjanjian Kinerja (PK), juga dapat dibandingkan capaiannya terhadap target Renstra BPS Kabupaten Bandung 2020-2024. Capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2022 terhadap target tahun pertama (2020) terhadap tahun t (2022) dan terhadap tahun akhir periode (2024) pada periode Renstra 2020-2024, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 20. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Terhadap Target Renstra 2020, 2022, 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
		2020	2022	2024	2022	2020	2022	2024
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan								
1.1.	Persentase pengguna data yang memanfaatkan Data Statistik yang Berkualitas	75	92	93	94,44	125,92	102,65	101,55
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	-	100	100	100	-	100	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN								

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
		2020	2022	2024	2022	2020	2022	2024
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	25	30	25	-	100	83,33
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	-	50	60	50	-	100	83,33
T.3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN								
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	-	90	95	90	-	100	94,74
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi								
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	61,2	69,5	70,5	74,94	122,45	107,83	106,30
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	75	93	94	98,48	131,31	105,89	104,77

Tujuan pertama, yaitu *“Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”* dengan sasaran strategis *“ Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas”*, terdapat dua indikator yang dapat menggambarkan realisasi pencapaian kinerja di lingkup BPS Kabupaten Bandung.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama yaitu *“persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”* tercatat sebesar 94,44 persen. Capaian ini sudah melampaui target Renstra periode 2020-2024. Terhitung capaian terhadap target Renstra tahun 2020 mencapai 125,92 persen, sebesar 102,65 persen terhadap target tahun 2022 dan mencapai 101,55 persen terhadap target Renstra tahun 2024.

Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan usaha semua pihak yang berkolaborasi baik di bidang teknis maupun administrasi sehingga mampu mencapai kinerja yang optimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah nilai capaian setiap tahunnya sangat bergantung pada jumlah dan persepsi konsumen yang berkunjung ke fasilitas pelayanan terpadu (PST) BPS Kabupaten Bandung. Solusi yang dilakukan diantaranya adalah dengan terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pelayanan secara berkesinambungan kepada Dinas/Instansi terkait sebagai pengunjung pelayanan dengan menggandeng Diskominfo dan Bappeda sebagai mitra kerja di level Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini, peran tim kualitas pelayanan publik telah berupaya maksimal dalam memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang baik dan benar terkait Survei Kebutuhan Data. Selain itu arahan dan bimbingan juga diberikan kepada pengguna data khususnya para OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bandung untuk dapat menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan di sektornya masing-masing.

Sementara itu, realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua, yaitu *“persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”* tercatat sebesar 100 persen.

Perbandingan terhadap target Renstra tahun 2022 dan 2024, capaian kinerja mencapai 100 persen baik pada tahun 2022 maupun untuk akhir periode Renstra di 2024. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai catatan capaian terhadap target Renstra tahun 2020 tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan konsep pada indikator kinerja utama dalam rangka penyempurnaan arah kebijakan dan strategi Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Adanya kendala teknis yang dihadapi dalam penyusunan publikasi dapat diselesaikan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan, pengkinian data, dan meningkatkan fungsi koordinatif dengan wali data dan produsen data.

Dengan demikian, secara umum tujuan pertama yaitu *“menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”* dengan sasaran strategis *“meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”* terhadap target Renstra 2020-2024 telah tercapai dengan baik. Kedepannya pencapaian ini diharapkan dapat terus ditingkatkan, terutama dari sisi kualitas, karena diyakini data yang berkualitas akan berguna bagi pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Tujuan kedua yaitu *“Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN”* dengan sasaran strategis *“Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN”* diwujudkan oleh dua indikator kinerja utama.

Pertama, adalah *“Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik”* dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 25 persen. Capaiannya terhadap target Renstra tahun 2022 adalah sebesar 100 persen. Sementara terhadap target Renstra tahun 2024 terhitung sebesar 83,33 persen.

Seperti halnya dengan pencapaian IKU kedua, capaian kinerjanya terhadap target Renstra tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan keterangan yang sama. Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target ini, diantaranya adalah kesiapan para produsen data dalam melaporkan kegiatan statistik sektoral terbilang masih rendah. Dalam prakteknya BPS Kabupaten Bandung terus berupaya untuk

melakukan koordinasi secara optimal dengan walidata dan sekretariat SDI terkait kegiatan statistik sektoral.

Indikator kinerja utama lainnya yang mendukung terwujudnya sasaran strategis *“Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN”* yaitu *“Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar”*. Realisasi nya pada tahun 2022 sebesar 50,00 persen sesuai dengan target Renstra tahun 2022 yang telah ditetapkan Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerjanya mencapai 100 persen. Sementara pencapaian terhadap tahun akhir periode Renstra, yaitu tahun 2024, terhitung sebesar 83,33 persen, atau belum mencapai 100 persen. Adapun capaian kinerjanya terhadap target Renstra tahun 2020, tidak dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan konsep pada indikator kinerja utama dalam rangka penyempurnaan arah kebijakan dan strategi Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Namun demikian, meskipun kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Terwujudnya para OPD yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dan menyampaikan metadata sektoral sesuai standar bukan perkara mudah. Hal ini terkait dengan kontinuitas pembinaan statistik yang dilaksanakan oleh BPS sebagai instansi Pembina. Beberapa SKPD belum mempunyai persepsi yang sama tentang metadata, sehingga instansi/OPD yang menjadi objek pengumpulan data belum memberikan penjelasan terkait kegiatan statistik yang dilaksanakan. Disinilah peran BPS harus terus digiatkan untuk terus berupaya melaksanakan pembinaan statistik sektoral secara berjenjang dan berkesinambungan dengan dibantu oleh Diskominfo untuk melakukan sosialisasi, utamanya melalui Forum SDI sehingga akan tercipta pemahaman OPD terkait manfaat dari kegiatan pelaporan kegiatan statistik di sektornya masing-masing. Koordinasi yang intens terutama dengan Dinas Kominfo akan menjadi wadah untuk menjembatani terlaksananya pembinaan statistik dengan semua OPD dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Bandung.

Pencapaian tujuan ketiga yaitu *“Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”* dengan sasaran strategis *“penguatan statistik sektoral K/L/D/I”* diwujudkan oleh indikator kinerja utama *“Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)*

yang mendapatkan pembinaan statistik". Realisasinya pada tahun 2022 sebesar 90,00 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen atau sesuai dengan target Renstra tahun 2022. Sementara capaian kinerja terhadap Renstra 2024 sebesar 94,74 persen. Adapun capaian kinerjanya terhadap target Renstra tahun 2020, tidak dapat diperbandingkan.

Kendala yang dirasa ada dalam pencapaian tujuan ini adalah masih terbatasnya SDM yang paham dengan statistik terutama dari pihak produsen data. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sosialisasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan meningkatkan fungsi koordinatif walidata.

Kedepannya capaian kinerjanya diharapkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sosialisasi akan terus diupayakan kepada para OPD terkait peran BPS sebagai pembina penyelenggaraan statistik sektoral. Hal ini menjadi tantangan bagi BPS Kabupaten Bandung, untuk menumbuhkan kesadaran terkait pentingnya data statistik yang sesuai dengan standar sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah daerah sesuai sektornya masing-masing.

Tujuan terakhir yang dituangkan dalam tujuan keempat yaitu "*Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi*" dengan sasaran strategis "*SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan*" diwujudkan dalam dua indikator kinerja utama. Indikator pertama, hasil penilaian implementasi SAKIP dimana realisasinya pada tahun 2022 sebesar 74,94 poin, jauh berada diatas target Renstra tahun 2020 sebesar 61,20 poin. Dengan demikian, capaian kinerjanya terhadap target Renstra 2020 tercapai sebesar 122,45 persen. Kemudian pencapaian terhadap target Renstra 2022 terhitung sebesar 107,83 persen. Sementara terhadap target Renstra 2024 yang menargetkan sebesar 70,5 poin, capaian kinerjanya terhitung sebesar 106,30 persen.

Capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Peningkatan birokrasi yang akuntabel akan terus diupayakan yang diawali dengan menindaklanjuti pemenuhan dokumen sesuai

dengan permintaan dokumen dan arahan dari inspektorat, penyempurnaan sistem penguatan akuntabilitas kinerja, penyusunan dan penerapan sistem manajemen kinerja, sistem monitoring dan evaluasi serta penyusunan indikator kinerja untuk dapat diterapkan demi tercapainya kinerja instansi yang akuntabel dan terukur. Dengan demikian, sejalan dengan penerapan kerja dan pelaporan yang terstruktur dan tepat waktu dapat meningkatkan nilai SAKIP di masa mendatang.

Indikator kedua, persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, dimana nilai realisasi dan capaian kinerja 2022 diperoleh dari hasil penilaian Survei Kepuasan Data 2022 dengan hasil penilaian yang sudah memenuhi/di atas target tahunan maupun target Renstra tahun 2020. Capaian kinerja indikator ini terhadap target Renstra tahun 2020 adalah sebesar 131,31 persen. Kemudian capaian kinerja indikator ini terhadap target Renstra 2022 adalah sebesar 105,89 persen. Sementara capaian kinerja indikator ini terhadap target Renstra 2024 adalah sebesar 104,77 persen.

Kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS menjadi tolak ukur untuk pelayanan yang prima BPS Kabupaten Bandung. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian adalah nilai capaian setiap tahunnya sangat bergantung pada jumlah dan persepsi konsumen yang berkunjung ke fasilitas pelayanan terpadu (PST) BPS Kabupaten Bandung. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sosialisasi, khususnya kepada pengunjung PST, untuk meningkatkan pemahaman yang baik dan benar terkait Survei Kebutuhan Data.

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN BANDUNG DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

Untuk memperoleh gambaran kinerja BPS Kabupaten Bandung yang lebih lengkap. Perbandingan realisasi capaian kinerja juga disajikan dengan perbandingan realisasi terhadap tahun terakhir (2021), dua tahun terakhir (2022) kemudian perbandingan selama 5 tahun terakhir (2018-2022)

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE 2020-2022

Tabel 21. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020, 2021, 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					110		88.36			101,33	
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	75	91,67	120	92	70,59	76,73	92	94,44	102.65
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	10,81	10,81	100	100	100	100	100	100	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					100		100			100	
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	6,06	6,06	100	100	100	100	25	25	100

terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	30	30	100	44,12	44,12	100	50	50	100
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					100			100			100
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10	10	100	10	10	100	90	90	100
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					108,74			109,92			106,86
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	61,2	69,28	113,20	69,5	69,39	99,84	69,5	74,94	107,83
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75	78,21	104,28	75	90,62	120	93	98,48	105,89

Tujuan Pertama, **menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**, memiliki rata-rata kinerja sasaran sebesar 110 persen pada tahun 2020, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 88,36 persen, namun kembali meningkat menjadi 101,33 persen di tahun 2022.

Pada tahun 2021 pencapaian indikator kinerja “*persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan*” berada di bawah target PK 2021. Salah satu hal yang menjadi kendala diantaranya adalah capaian nilai indikator ini setiap tahunnya sangat bergantung pada jumlah dan persepsi terkait SKD dari konsumen yang datang langsung ke PST BPS Kabupaten Bandung. Beberapa strategi yang telah diupayakan di antaranya adalah peningkatan koordinasi dengan K/L/D/I yang berkunjung, melakukan sosialisasi terkait pelayanan BPS ke K/L/D/I dan melakukan koordinasi dan sosialisasi di tingkat pemerintah daerah dengan menggandeng Diskominfo dan Bappeda.

Sementara itu pencapaian indikator “*persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi*” selalu tercapai 100 persen di setiap tahunnya.

Tujuan kedua, yaitu ***meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN*** memiliki rata-rata kinerja sasaran sebesar 100 persen di setiap tahunnya. Pencapaian ini didorong oleh tercapainya target dari kedua indikator pada tujuan tersebut, baik indikator (i) persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik maupun indikator (ii) persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.

Capaian Kinerja Tujuan ketiga, yaitu ***meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN*** terhitung sebesar 100% di setiap tahunnya. Realisasi pada tujuan ini berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, baik pada tahun 2020, 2021 maupun 2022.

Capaian Kinerja Tujuan keempat, ***penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi***, selalu tercapai melebihi 100 persen di setiap tahunnya. Capaian kinerja pada tujuan ini terhitung masing-masing tahun sebesar 108,74 (2020); 109,92 (2021) dan 106,86 (2022).

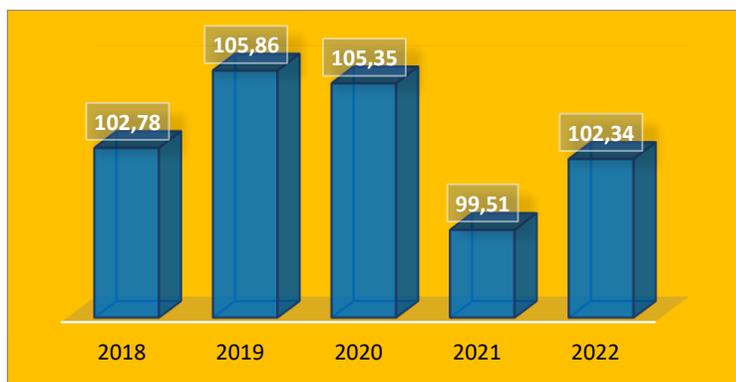
Pada indikator sasaran yang pertama, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2021. Terkait hal ini, seluruh jajaran BPS

Kabupaten Bandung diharapkan lebih meningkatkan lagi kualitas seluruh permintaan laporan dan bukti kegiatan termasuk penyusunan Laporan Kinerja yang lebih baik dan berkesinambungan dengan dokumen penilaian kinerja lainnya guna meningkatkan penilaian SAKIP di tahun yang akan datang.

Sementara itu untuk indikator kedua, *persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS*, dengan capaian sudah di atas 100% di setiap tahunnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TOTAL PERIODE 2018-2022

Secara keseluruhan perkembangan pencapaian kinerja BPS Kabupaten Bandung selama 5 tahun terakhir bergerak secara fluktuatif. Meski demikian, hampir seluruhnya berada pada angka 100 persen, kecuali pada tahun 2021.



Gambar 10. Persentase Realisasi Capaian Kinerja Total Tahun 2018-2022

Periode tahun 2018-2019 merupakan dua periode terakhir pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2018 terhitung sebesar 102,78 kemudian meningkat menjadi 105,86 di tahun 2019. Pencapaian ini berlanjut hingga mencapai 105,35 di tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pada periode Renstra 2020-2024.

Selanjutnya capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 5,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena tidak tercapainya salah satu indikator kegiatan utama pada tujuan pertama yaitu *“persentase pengguna data*

yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional". Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan utama ini adalah sebesar 92 persen, tetapi hanya terealisasi sebesar 70,59 persen. Salah satu hal yang menjadi kendala diantaranya adalah capaian nilai indikator ini setiap tahunnya sangat bergantung pada jumlah dan persepsi terkait Survei Kepuasan Data (SKD) dari konsumen yang datang langsung ke PST BPS Kabupaten Bandung. Beberapa strategi yang telah diupayakan di antaranya adalah peningkatan koordinasi dengan K/L/D/I yang berkunjung, melakukan sosialisasi terkait pelayanan BPS ke K/L/D/I dan melakukan koordinasi dan sosialisasi di tingkat pemerintah daerah dengan menggandeng Diskominfo dan Bappelitbangda sebagai mitra kerja di level Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk menggenjot realisasi indikator ini di tahun berikutnya.

Terakhir capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ketiga untuk rentang Renstra 2020-2024 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi capaian kinerja total tahun sebelumnya. Seluruh indikator kinerja utama pada tahun 2022 mampu mencapai bahkan melebihi target capaian yang telah ditentukan.

Pencapaian kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2022 sudah sangat memuaskan, tetapi tetap perlu menjadi perhatian bahwa masih banyak hal yang perlu untuk ditingkatkan, diperbaiki, dan dilengkapi dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Kerja sama, koordinasi dan komunikasi aktif tetap harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang didukung dengan pelaksanaan 45 Proyek Prioritas Strategis yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan.

Implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh

Prioritas Nasional (PN) tersebut adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan 7 (tujuh) Prioritas Tahun 2022 di atas, terdapat beberapa kegiatan Sensus atau Survei yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung diantaranya terdapat beberapa *output* yang masuk ke dalam 4 (empat) Prioritas Nasional Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (*Long Form* SP2020), masuk ke dalam **Prioritas Nasional : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;**
2. Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022, masuk ke dalam **Prioritas Nasional : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;**
3. Kegiatan Survei Statistik Tanaman Pangan dan Survei Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area, masuk ke dalam **Prioritas Nasional : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;**
4. Kegiatan Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2022, masuk ke dalam **Prioritas Nasional : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Adapun penjabaran beberapa kegiatan sensus atau survei yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung terdapat beberapa *output* yang masuk ke dalam 4 (empat) Prioritas Nasional 2022 sebagai berikut :

SENSUS PENDUDUK 2020 LANJUTAN (LF-SP2020)

Badan Pusat Statistik (BPS) Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 diamanatkan untuk melaksanakan sensus penduduk sekurang kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam perjalanannya, Sensus Penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan Sensus Penduduk yang ketujuh.

Kekuatan data Sensus Penduduk terletak pada kemampuannya menyediakan statistik dasar secara komprehensif dengan beragam kompleksitas perubahannya sampai wilayah administratif terkecil. Data Sensus Penduduk juga bermanfaat sebagai dasar menghitung parameter-parameter kependudukan, pembentukan kerangka sampel, dan penyusunan proyeksi penduduk. Selanjutnya, data SP2020 juga sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sensus Penduduk 2020 merupakan salah satu upaya Indonesia untuk menuju satu data kependudukan.

Sensus Penduduk 2020 merupakan upaya Indonesia untuk menuju satu data kependudukan. Pelaksanaan SP2020 beralih menggunakan metode kombinasi melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar dalam pelaksanaan SP2020. Rangkaian kegiatan SP2020 dilaksanakan ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan short form dan instrumen lainnya pada tahun 2020 kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan long form pada tahun 2021. Pada tahapan tahun 2020, pendataan dilakukan dengan Sensus Penduduk Online dan Sensus Penduduk September 2020. Output dari tahapan di tahun 2020 adalah jumlah penduduk Indonesia yang dirinci ke dalam beberapa variabel. Data-data terkait parameter demografi seperti kelahiran, kematian, dan 2 Laporan Kegiatan

Long Form SP2020 Kabupaten Bandung migrasi serta informasi penting lainnya dikumpulkan untuk menghasilkan indikator SDGs dan RPJMN bidang kependudukan.

Kegiatan Sensus Penduduk 2020 lanjutan atau *Long Form* SP2020 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk;
2. Memperoleh data untuk penghitungan parameter demografi antara lain kelahiran, kematian, dan migrasi;
3. Sumber data dari indikator Angka Kematian Ibu;
4. Memperbarui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk;
5. Menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahan;
6. Sumber data dari indikator kependudukan untuk SDGs yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Lanjutan 2020 (LF-SP2020) sebagai berikut :

Persiapan

1. Pembentukan Tim Pelaksana LF-SP2020;
2. Pembentukan Tim Jembatan Komunikasi LF-SP2020;
3. Rapat Persiapan LF-SP2020;
4. Penyusunan Manajemen Resiko LF-SP2020;
5. Identifikasi Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS);
6. Penyusunan Surat Perjanjian Kerja Petugas LF-SP2020 ;
7. Sosialisasi SP2020 Lanjutan ke OPD/masyarakat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung melaksanakan sosialisasi pelaksanaan *Long Form* SP2020 Lanjutan Tingkat Kabupaten Bandung. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada saat kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan seluruh OPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Sutan Raja, Jalan Raya

Soreang KM.17 No.10 Bandung 40912 dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.



8. Publisitas

Kegiatan makro publisitas di wilayah Kabupaten Bandung menggunakan sarana media Baliho, spanduk, Poster, dan kanal media sosial. Makro Publisitas yang sudah dilaksanakan antara lain:

- Spanduk

Sosialisasi Kegiatan Long Form SP2020 Lanjutan : Pemasangan Poster, Spanduk, Banner di Gedung Pemerintah Kantor Desa, Kecamatan dan Lingkungan Pemda Kabupaten Bandung



Lampiran Bukti Pelaksanaan Kegiatan IPS Kabupaten Bandung

- Poster

Sosialisasi Kegiatan Long Form SP2020 Lanjutan : Pemasangan Poster, Spanduk, Banner di Gedung Pemerintah Kantor Desa, Kecamatan dan Lingkungan Pemda Kabupaten Bandung



Lampiran Bukti Pelaksanaan Kegiatan BPS Kabupaten Bandung

16

Sosialisasi Kegiatan Long Form SP2020 Lanjutan : Pemasangan Poster, Spanduk, Banner di Gedung Pemerintah Kantor Desa, Kecamatan dan Lingkungan Pemda Kabupaten Bandung



Lampiran Bukti Pelaksanaan Kegiatan BPS Kabupaten Bandung

17

- Baliho



- Video Dukungan



9. Penyusunan Surat Dukungan Bupati

Surat Edaran Dukungan Bupati Bandung terhadap Kegiatan Long Form SP2020 Lanjutan



10. Rekrutmen Petugas Lapangan LF-SP2020

Rekrutmen petugas Long Form SP2020 dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 untuk Koseka, dan Kortim/PPL tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2022. Dengan jumlah peserta seleksi sebanyak 679 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 644 orang (583 dinyatakan lulus dan 61 cadangan).



11. Pelatihan Petugas Lapangan LF-SP2020

Kegiatan Pelatihan Petugas Pendataan *Long Form* SP2020 BPS Kabupaten Bandung dilaksanakan di 2 (dua) tempat Pusat Pelatihan/*Training Centre* (TC) yaitu :

- Hotel Grand Pasundan yang beralamat di Jalan Pembela Tanah Air / Peta No.147 - 149, Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231)

- Hotel Tebu yang beralamat di Jalan L.L.R.E Martadinata / Riau No. 62 Bandung)

Waktu pelaksanaan Pelatihan Petugas Pendataan *Long Form* SP2020 mulai tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022, terbagi dalam 2 (dua) gelombang Pelatihan dan setiap gelombang diselenggarakan selama 4 (empat) hari *Full Board*.

Jumlah kelas pelatihan Petugas Pendataan *Long Form* SP2020 adalah sebanyak 24 kelas yang terdiri dari 16 Kelas di TC Hotel Grand Pasundan dan 8 Kelas di TC Hotel Tebu, dengan jumlah total Peserta Pelatihan Petugas Pendataan *Long Form* SP2020 (gelombang 1 dan 2) sebanyak 560 orang peserta terdiri dari 403 PPL, 135 Kortim, 22 Koseka), dan setiap kelas dibimbing oleh 2 orang Instruktur Daerah (INDA IT dan INDA *Instrument*) serta 2 orang Panitia.



Pelaksanaan Lapangan

1. Persiapan Lapangan

Pendataan *long form* SP2020 dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Bandung. Jumlah sampel yang dicakup di Kabupaten Bandung sebanyak 2.011 blok sensus dengan 32.176 rumah tangga sampel, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

2. Pemutakhiran LF-SP2020

Pemutakhiran dilakukan secara *door to door* pada setiap keluarga/ rumah tangga yang ada dalam pemutakhiran sesuai dengan cakupan wilayah sampel

3. Supervisi Pemutakhiran LF-SP2020

Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pada pendataan *long form* SP2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Standard Operasional Procedure (SOP) yang telah ditentukan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan pendataan *long form* SP2020, mengatasi berbagai masalah dan kendala yang ditemui di lapangan agar segera dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.



4. Penarikan Sampel LF-SP2020

Pada kegiatan pendataan *Long Form* SP2020 penarikan sampel rumah tangga dilakukan secara komputersisasi menggunakan aplikasi, baik di wilayah PAPI maupun CAPI.

5. *Assignment* Rumah Tangga Sampel LF-SP2020

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan untuk mengunggah data dari aplikasi pemutakhiran sampai dengan menghasilkan file data approval data NKS yang digunakan untuk aktivasi sampel.

6. Pendataan LF-SP2020

Pendataan LF SP2020 di Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung menggunakan CAPI. Petugas Pendata Lapangan (PPL) mengisi daftar pertanyaan di gadget (HP *Smart Phone*). Pengisian pertanyaan dilakukan menggunakan aplikasi Fasih yang berbasis android.

7. Supervisi Pendataan LF-SP2020

Supervisi pendataan *Long Form* SP2020, tim sama sama dengan supervisi pemutakhiran, yang membedakan hanya form/ LK supervisi yang dibawa ke lapangan.



8. Penjamin Kualitas LF-SP2020

Tujuan diadakannya PK LF-SP2020 adalah sebagai:

- *Early Warning* (mendeteksi indikasi kesalahan) agar kesalahan dapat segera diperbaiki dan dicegah supaya tidak terjadi secara massif, dan
- Mengetahui indikasi kesalahan SOP dan konten.

Kabupaten Bandung terpilih menjadi salah satu sampel PK Pemutakhiran dari total 40 Kab /Kota sampel PK Pemutakhiran. Petugas PK dari BPS pusat adalah Bapak Tri Sulistyio T.E. Dua blok sensus terpilih adalah 011 B Desa Cibodas

Kecamatan Pasirjambu dan 043B Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih. Keduanya merupakan desa dengan klasifikasi perkotaan dan SLS tunggal.

9. Tindak Lanjut Penjaminan Kualitas LF-SP2020

Dalam hal PK pendataan, Kabupaten Bandung tidak menjadi sampel, namun tetap berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut instruksi PK LF-SP2020. Setelah seluruh instruksi disampaikan kepada petugas, seluruh koseka berkewajiban mengisi 2 (dua) action card di Kaizala. Sebagai catatan, koseka yang tidak melaksanakan tindak lanjut PK ini diwajibkan menandatangani surat pernyataan.



Monitoring dan Evaluasi

1. Briefing Koseka/Kortim LF-SP2020

Briefing Koseka (Koordinator Sensus Kecamatan) yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2022 bertempat di Aula BPS Kabupaten Bandung. Briefing yang diselenggarakan bertujuan untuk menyatukan pemahaman antara BPS Kabupaten Bandung dengan para petugas dalam hal ini diwakili oleh Koseka tiap kecamatan.

2. Rapat Monitoring dan Evaluasi BPS Kabupaten Bandung

Rapat monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung dalam rangka menjaga ketepatan dan kualitas data.

3. Monitoring

Kegiatan monitoring LF SP2020 dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung dalam rangka untuk mengawal proses pemutakhiran dan pencacahan saat dilapangan. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh proses dapat berjalan dan selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4. Evaluasi

Evaluasi hasil Penjaminan Kualitas Pemutakhiran LF SP2020 disampaikan oleh Petugas Penjaminan Kualitas dari BPS RI.

No	Evaluasi
1.	Perbaiki/Perhatikan Identifikasi Jumlah Pengelolaan Makan/Minum dan Kebutuhan dalam Keluarga. PPL melakukan probing lebih dalam dan melakukan perbaikan isian kolom 7 bila ada kesalahan
2.	Perbaiki/Perhatikan Identifikasi KK/KRT. PPL melakukan probing lebih dalam dan melakukan perbaikan isian kolom 9 bila ditemukan kesalahan
3.	Perbaiki/Perhatikan Identifikasi Kejadian Kematian dalam Rumah Tangga. PPL melakukan probing lebih dalam dan melakukan perbaikan isian kolom 18 bila ditemukan kesalahan
4.	Perbaiki/Perhatikan Identifikasi Posisi dan No. Urut Bangunan pada Peta WB-2020 dan LF.SP2020-P. Pastikan ppl melakukan perbaikan peta WB sesuai dengan kondisi lapangan
5.	Berhati-hati pada Identifikasi keberadaan keluarga karena banyak kurang paham konsep. Instruksi : Pastikan semua keluarga yang ada dalam blok sensus terdata

6. Agar dipastikan PPL mengunjungi bangunan tempat tinggal secara *door to door* secara lengkap

Permasalahan dan Solusi

1. Tahap Persiapan

No	Permasalahan	Solusi
1	Petunjuk penyelenggaraan rekrutmen sering berubah	Panitia sebisa dan secepat mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan segera menerapkannya dalam rekrutmen petugas
2	Rekrutmen petugas dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19	Melakukan protokol Kesehatan yang ketat untuk setiap proses kegiatan rekrutmen
3	Keterbatasan tempat pelaksanaan tes wawancara di masa pandemi Covid-19	Memberlakukan tes wawancara dengan disebar di beberapa kecamatan untuk mitra yang sudah terdaftar di database simitra

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ditemukan beberapa kesalahan dalam menulis no urut rumah tangga dan nomor urut bangunan	Memberikan penjelasan Kembali untuk konsep nomor urut bangunan dan nomor urut bangunan yang ada peta WB
2	Masih ditemukan beberapa kesalahan konsep pengisian kolom 9 dan kolom 10	Memberikan penjelasan Kembali untuk konsep rumah tangga dan konsep keluarga

No	Permasalahan	Solusi
3	Masih ditemukan beberapa kesalahan dalam penjumlahan	Perbaiki penjumlahan sesuai kaidah penjumlahan, hasil akhir dari penjumlahan harus sama dengan no urut rumah tangga terbesar
4	Kode KBLI untuk petani/ nelayan masih banyak yang kurang pas	Perbaiki KBLI menjadi kode 01 pertanian
5	Kode KBJI petani pemilik dan buruh tani masih sama	Perbaiki KBJI pemilik menjadi kode 61 dan buruh tani kode 92
6	Agama anak berbeda dengan agama orangtuanya	Perbaiki dan sesuaikan dengan agama orangtuanya
7	Umur kurang dari 10 tahun memiliki ijazah tamat SD ke atas, umur 12 tahun memiliki ijazah SMP, umur 15 tahun memiliki ijazah SMA	Perbaiki ijazah sesuaikan dengan umurnya
8	Kasus kosong 9 25 di aplikasi fasih, beberapa data yang berhasil di submit oleh pencacah, Ketika dicek di fasih kortim masih kosong tidak ada isian	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk PPL lakukan backup data (kirim di WA/ Save drive) kortim dan koseka tidak perlu - Clear data dan clear cache aplikasi fasih - Lakukan log in dan ikuti petunjuk aplikasi fasih - Sinkronisasi Selesai
9	Kasus pending	Batal upload kemudian upload

No	Permasalahan	Solusi
		ulang
10	Kasus <i>delete art</i> , dan kasus kehamilan	Di coba pakai HP yang berbeda

PENDATAAN AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) TAHUN 2022

Tiga reformasi struktural dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan 2022 yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana.

Pendataan Awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu, juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data Pedoman Pendataan Lapangan Regsosek 2022 Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten.

Tujuan dari Pendataan lapangan adalah untuk menyediakan data awal yang akan menjadi basis data bagi seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Pendataan Lapangan Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi yang meliputi sebagai berikut:

- (1) Kondisi Sosial Ekonomi Demografis;
- (2) Kondisi perumahan dan sanitasi air bersih;
- (3) Kepemilikan aset;

- (4) Kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus;
- (5) Informasi geospasial;
- (6) Tingkat kesejahteraan; dan
- (7) Informasi sosial ekonomi lainnya

Identifikasi satuan lingkungan dalam kegiatan Regsosek 2022 yang berjumlah 19.229 yang terdiri dari 17.820 SLS dan 1.409 Non SLS yang tersebar di 280 Desa/Kelurahan di 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Rekrutmen petugas pada kegiatan Pendataan Awai Regsosek dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan seksama. Guna memperlancar kegiatan rekrutmen petugas, BPS Kabupaten/Kota perlu secara aktif meminta masukan, konsultasi, atau kerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah (Pemda) seperti Camat dan Kepala Desa/Lurah. Petugas Pendataan Awai Regsosek berasal dari anggota masyarakat dan diupayakan dari wilayah setempat.



Kegiatan Pelatihan Petugas Pendataan Regsosek 2022 BPS Kabupaten Bandung dilaksanakan di 5 (lima) tempat Pusat Pelatihan/ *Training centre (TC)* yaitu :

- (1) Hotel Grand Pasundan yang beralamat di Jalan Peta No.147-149, Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231;
- (2) Hotel Sari Ater Kamboti yang beralamat di Jl. Lemah nendeut No 7, Sukawarna Kee. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40164;
- (3) Hotel Ibis yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No 289, Cibangkong Kee. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40273
- (4) Hotel Horison yang beralamat di Jl. Pelajar Pejuang 45 No.121, Turangga, Kee. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264;
- (5) Hotel Harris yang beralamat di Jl. Peta No.241, Suka Asih, Kee. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231;

Waktu pelaksanaan pelatihan petugas pendataan Regsosek 2022 mulai tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022. terbagi dalam 5 (lima) gelombang Pelatihan dan setiap gelombang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari *Full Board*. Jumlah kelas pelatihan Petugas Pendataan Regsosek 2022 adalah sebanyak 233 kelas yang terdiri dari 45 Kelas di TC Hotel Grand Pasundan, 50 kelas di TC Hotel Sari Ater Kamboti, 43 kelas di TC Hotel Ibis, 45 kelas di TC Hotel Horison, dan 50 kelas di TC Hotel Harris, dengan jumlah total Peserta Pelatihan Petugas Pendataan Regsosek 2022 (gelombang I hingga 5) sebanyak 5.677 orang peserta terdiri dari 4.522 PPL, 1.124 PML, dan 31 Koseka Mitra), dan setiap kelas dibimbing oleh seorang instruktur Daerah (INDA) serta seorang panitia.

Petugas baik Petugas Pendataan Lapangan, Petugas Pemeriksa Lapangan dan Koseka Mitra berhak mendapatkan asuransi. Sebanyak 5.676 petugas diasuransikan menggunakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan selama 2 bulan, yaitu periode 1 Oktober 2022 hingga 30 November 2022.

Pelaksanaan Pendataan Lapangan Regsosek diawali dengan melakukan Verifikasi Keluarga. Verifikasi keluarga dilakukan oleh PPL dengan cara mendatangi ketua SLS pada

tanggal 14-15 Oktober 2022. Adapun yang diverifikasi oleh PP adalah keberadaan keluarga dan status keluarga (sangat miskin, miskin, dan tidak miskin). PPL melakukan pendataan dengan Dokumen Regsosek22-K dan Aplikasi Wilkerstat Regsosek untuk tagging Bangunan Tempat Tinggal, serta aplikasi Regsosek Khusus untuk memvalidasi status keluarga miskin dan sangat miskin.

Mekanisme untuk Pendataan Wilayah Khusus Regsosek 2022, yaitu PPL melakukan wawancara kepada keluarga khusus dan melengkapi isian Kuesioner REGSOSEK22-XK. Syarat wilayah/keluarga khusus ditentukan oleh BPS Kabupaten/kota setelah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Malam Regsosek merupakan bagian dari kegiatan pendataan awal regsosek yang meliputi pendataan untuk tunawisma dan ODGJ yang dilakukan pada malam hari yaitu tanggal 31 Oktober 2022 mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 06.00 tanggal 1 November 2022.

Sebelum melakukan pendataan, BPS Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait (Dinas Sosial, Satpol PP, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Ketua/Pengurus SLS) untuk membantu dalam proses pendataan.

Pendataan Awal Regsosek orang penting (Bupati, anggota DPRD, atau tokoh masyarakat) diperlukan guna sebagai image branding dari kegiatan regsosek agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses kegiatan pendataan awal regsosek. Adapun yang dijadikan responden dalam pendataan orang penting, yaitu:

- (1) Bupati;
- (2) Wakil Bupati;
- (3) Kapolres; dan;
- (4) Anggota DPR RI.

Dalam kegiatan statistik Pendataan Awal Regsosek 2022, *Monitoring* Kualitas digunakan untuk meminimalkan tingkat kesalahan, terutama pada tahap kegiatan statistik pengumpulan data di lapangan. Kegiatan *Monitoring* Kualitas Pendataan Awal

Regsosek 2022 ini akan disebut dengan terminologi MK Pendataan Awal Regsosek 2022. MK Pendataan Awai Regsosek 2022 meliputi pelaksanaan MK Konten dan Tata Laksana/SOP (Standar Operasional Prosedur) petugas di lapangan, MK Pendataan Awal Regsosek 2022 diselenggarakan pada wilayah kecamatan terpilih sebagai sampel MK Pendataan Awai Regsosek 2022 yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung.

Kemudian dikarenakan cakupan keluarga di Kabupaten Bandung pada kegiatan Regsosek lebih rendah dibandingkan Sensus Penduduk 2020 maka diadakan *groundcheck*. Prinsip-prinsip terkait dengan kegiatan *Ground Check Coverage*, yaitu sebagai berikut:

- (1) Agar dipastikan keberadaan keluarga yang ada pada prelist atau keluarga baru yang belum masuk di VK1 padahal tinggal di SLS tsbl
- (2) Jika ditemukan, cukup catat keberadaannya. Kalau tidak ada di prelis (Kuesioner Regsosek22-VK1), agar nama keluarganya catat dilembar kertas terpisah. Petugas *groundcheck* ke lapangan menggunakan hasil fotokopian kuesioner regsosek22-VK1
- (3) Tidak dilakukan pendataan dengan kuesioner K.;
- (4) Untuk web repo dibuka sampai tanggal 15 Desember maka bisa mengoptimalkan untuk menambah cakupan di VK1.

Pengumpulan data regsosek 2022 di Kabupaten Bandung telah direncanakan dimulai dari pengadaan instrumen dan perlengkapan petugas pendataan, pelatihan petugas pendataan, pendataan lapangan, monitoring kualitas, penyusunan dan pengujian Mode; *Proxy Mon Test (PMT)*. Disisi lain, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan hasil pendataan lapangan yaitu jumlah keluarga di Kabupaten Bandung berstatus *undercovered*. Namun, BPS Kabupaten Bandung mengadakan *groundcheck* di beberapa SLS yang tersebar di Kabupaten Bandung untuk menanggapi pendataan yang *undercovered*.

PENDATAAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA (KSA)

Di Indonesia, peranan sektor pertanian sangat penting karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, pemerintah Indonesia juga sedang gencar melancarkan program-program yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian dalam upaya mendukung salah satu Nawacita yakni terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, tersedianya data pertanian yang tepat waktu dan akurat merupakan pondasi untuk dapat mewujudkan kebijakan pertanian yang tepat sasaran.

Selama ini, pengumpulan data luas panen baik padi maupun palawija masih menggunakan metode konvensional dengan menggunakan daftar isian Statistik Pertanian (SP). Berdasarkan metode tersebut, pengumpulan data luas panen masih didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Meskipun secara praktikal, metode tersebut mudah untuk diterapkan, tetapi penggunaan metode tersebut masih memiliki kekurangan. Rendahnya akurasi dan waktu pengumpulan data yang cukup lama menjadi beberapa kekurangan dari penggunaan metode tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan yang berbasis teknologi dalam rangka memperbaiki metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk “Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)”.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengestimasi luas panen pada tanaman padi dan jagung untuk mendukung penjaminan ketersediaan data dasar dalam rangka peningkatan nilai tambah PDRB Kabupaten Bandung dan mendukung program swasembada pangan yang telah dijalankan.

Pelaksanaan kegiatan Statistik Tanaman Pangan terintegrasi di Indonesia dengan metode Kerangka Sampel Area bertujuan untuk memperbaiki metode pengumpulan data yang sebelumnya konvensional menjadi lebih objektif dan mutakhir dengan melibatkan teknologi sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut pengembangan dan perbaikan dari kegiatan uji coba yang telah dilaksanakan di Pulau Jawa pada tahun 2017.

Jumlah sampel (segmen) yang tercakup dalam Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) selama satu tahun adalah 118 segmen untuk komoditas Padi dan 108 segmen untuk komoditas jagung yang tersebar di 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, kecuali untuk jagung tidak ada sampel segmen di wilayah Kecamatan Rancaekek.

Estimasi luas panen merupakan hasil penjumlahan luas panen pada saat periode pengamatan dan luas panen di antara 2 survei dengan survei sebelumnya. Di samping mengestimasi luas panen, hasil pengamatan pada segmen KSA juga dapat digunakan untuk menghitung potensi luas panen hingga tiga bulan ke depan

Pelaksanaan kegiatan Survei Tanaman Pangan yang Terintegrasi dengan KSA tahun 2022 di Kabupaten Bandung berjalan dengan baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sebesar 100 persen untuk seluruh target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut ditunjukkan dalam data realisasi kegiatan pada bagian lampiran. Kendala yang terjadi selama kegiatan berkaitan dengan perangkat yang dimiliki oleh petugas untuk melaksanakan KSA. Spesifikasi perangkat yang dimiliki petugas tidak semuanya memenuhi spesifikasi minimal yang dapat digunakan untuk memasang aplikasi Survei KSA. Selain itu, kendala jaringan yang belum merata dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Bandung dapat menghambat kelancaran petugas dalam melaksanakan KSA.

SURVEI BIAYA HIDUP

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan Pemerintah. Persentase perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi merupakan indikator ekonomi penting yang kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Salah satu bahan dasar penghitungan IHK adalah Survei Biaya Hidup (SBH).

SBH 2022 bertujuan untuk menghasilkan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan IHK. Pelaksanaan SBH 2022 menggunakan sampel rumah tangga yang independen setiap triwulan selama tahun 2022. Rumah tangga mencatat pengeluaran konsumsi bukan makanan setiap bulan, sedangkan konsumsi makanan dicatat setiap hari selama seminggu pada bulan terakhir setiap triwulan.

Kabupaten Bandung merupakan bagian dari 60 kabupaten tambahan sampel SBH 2022 yang dilakukan di daerah pedesaan. Survei ini dilakukan dengan total sampel setahun sebanyak 290 blok sensus, dengan total sampel rumah tangga sebanyak 1.900 rumah tangga.

Perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut mengakibatkan paket komoditas (*commodity basket*) dan diagram timbang hasil SBH 2018 sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat. 3 Sehingga perlu dilaksanakan kembali SBH 2022 untuk mengupdate paket komoditas dan diagram timbang tersebut.

Tujuan SBH 2022 secara rinci adalah memperoleh paket komoditas dan diagram timbang perkotaan dan provinsi untuk memperbaharui IHK tahun dasar 2018, mendapatkan data dasar nilai konsumsi (NK0), mendapatkan keterangan tentang profil sosial ekonomi rumah tangga perkotaan dan pedesaan, melengkapi data yang diperlukan

untuk penghitungan pendapatan regional dan nasional, dan digunakan sebagai bahan penelitian dan analisis perekonomian.

Survei ini dilakukan dengan total sampel setahun sebanyak 200 blok sensus, dengan total sampel rumah tangga sebanyak 2.000 rumah tangga. Kriteria rumah tangga yang memenuhi syarat terpilih sebagai sampel SBH2022 meliputi:

- (1) Rumah tangga biasa dengan jumlah anggota rumah tangga 2 sampai dengan 10 orang;
- (2) Rumah tangga yang minimal satu anggota rumah tangganya bekerja (menerima upah/gaji atau berusaha);
- (3) Rumah tangga yang tidak berencana pindah selama periode pencacahan tahun 2022.

Pada kegiatan SBH2022 beberapa data yang dikumpulkan diantaranya:

- (1) Tahapan Updating BS, untuk mendapatkan 10 sampel rumahtangga, sesuai persyaratan SBH2022 dengan menggunakan daftar VBH22-P 4;
- (2) Proses penarikan sampel yang dilakukan oleh sistem ICS;
- (3) Pengumpulan data non makanan bulanan yang di data setiap bulan selama satu triwulan dengan menggunakan kuesioner VBH22-BL;
- (4) Pengeluaran non makanan juga didata pada anggota rumah tangga ekonomi (13 tahun keatas) dengan menggunakan daftar VBH22-BLp digunakan untuk mencatat pengeluaran konsumsi (selain bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dan bukan konsumsi oleh anggota rumah tangga dewasa secara bulanan yang dilakukan di luar rumah tangga;
- (5) Pencatatan pengeluaran konsumsi rumah tangga (bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) secara harian selama satu minggu dengan menggunakan daftar VBH22-HR;
- (6) Pengeluaran makanan juga didata pada anggota rumah tangga ekonomi (13 tahun keatas) dengan menggunakan daftar VBH22-HRp;

- (7) Daftar VBH22-LK digunakan untuk merekap pengeluaran konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau selama seminggu (daftar VBH22-HR dan VBH22-HRp) Daftar VBH22-KK Daftar yang digunakan untuk mengkonversi satuan jenis barang dari satuan setempat ke satuan standar. Daftar ini juga digunakan untuk memperoleh nilai perkiraan dari jenis barang yang bukan berasal dari pembelian (lainnya);
- (8) Daftar VBH22-S Kuesioner ini digunakan untuk mencatat pengeluaran konsumsi bukan makanan, pengeluaran bukan konsumsi dan pendapatan/penerimaan rumah tangga yang belum tercakup dalam VBH22-BL.

Tahapan Persiapan

Adapun tahapan persiapan yang dilakukan di BPS Kabupaten Bandung meliputi:

- (1) Alokasi petugas, yaitu menyiapkan petugas-petugas baik pencacah maupun pengawas/pemeriksa untuk SBH22 baik dari unsur organik maupun mitra statistik yang sudah terlatih;
- (2) Melakukan Pelatihan dan refreshing pembekalan materi kepada seluruh petugas;
- (3) Mengalokasikan sampel kepada pencacah, yaitu memberikan objek yang akan dicacah oleh petugas lapang.;
- (4) Mengalokasikan instrumen dan kelengkapan administrasi, yaitu menyerahkan Daftar kuesioner-kuesioner untuk kegiatan SBH diantaranya: VBH22-P, VBH22-DSRTU, VBH22-DSRTP, VBH22-DSRTP kosong, VBH22-FPPS, Peta WB-2020, VBH22-BL, VBH22-BLp, VBH22-HR, VBH22-HRp, VBH22-LK, VBH22-S, VBH22-KK dan surat tugas serta dokumen administrasi lainnya

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan lapangan kegiatan Survei Biaya Hidup (SBH22) di BPS Kabupaten Bandung tahun 2022 berjalan dengan lancar, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala teknis selama pendataan lapangan. Kendala utama adalah respon dari responden dan pandemi Covid-19 di awal-awal tahun masih menjadi kendala utama. Untuk memastikan kegiatan lapangan berjalan dengan baik maka

dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, baik berupa reminder ke petugas maupun supervisi ke lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan lapangan antara lain:

- (1) Melaksanakan updating rumah tangga pada Blok Sensus terpilih setiap triwulan, kegiatan ini dilaksanakan dengan metode CAPI yaitu menggunakan aplikasi ICS, hasil dari tahapan ini adalah didapatkan 10 sampel rumah tangga terpilih dan sebanyak 20 rumah tangga sampel pengganti. Jumlah BS yang di updating pada tahun 2022 sebanyak 160 BS, sedangkan updating triwulan I dilaksanakan pada Desember 2021 sebanyak 40 BS;
- (2) Pencacahan pengeluaran konsumsi rumah tangga (selain bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dan bukan konsumsi secara bulanan dengan kuesioner VBH22-BL, target sampel selama tahun 2022 sebanyak 2.000 rumahtangga, dengan jumlah dokumen sebanyak 6.000, Pada triwulan I target sebanyak 400 sampel rumahtangga yang di data pada periode Januari-Maret 2022 dengan jumlah dokumen sebanyak 1.200 dokumen. Capaian realisasi pencacahan BL selama periode Januari Maret 2022 sebesar 100 persen. Pada triwulan II target sebanyak 540 sampel rumah tangga yang di data pada periode April-Juni 2022 dengan jumlah dokumen sebanyak 1.620 dokumen. Capaian realisasi pencacahan BL selama periode April-Juni 2022 sebesar 100 persen. Pada triwulan III target sebanyak 530 sampel rumah tangga yang di data pada periode Juli-September 2022 dengan jumlah dokumen sebanyak 1.590 dokumen. Capaian realisasi pencacahan BL selama periode Juli-September 2022 sebesar 100 persen. Pada triwulan IV target sebanyak 530 sampel rumah tangga yang di data pada periode Oktober-Desember 2022 dengan jumlah dokumen sebanyak 1.590 dokumen. Capaian realisasi pencacahan BL selama periode Oktober-Desember 2022 sebesar 100 persen;
- (3) Pencacahan pengeluaran konsumsi rumah tangga (bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) secara harian selama satu minggu dengan

menggunakan daftar VBH22-HR. target sampel selama tahun 2022 sebanyak 2.000 rumahtangga, dengan jumlah dokumen sebanyak 2.000. Pencacahan VBH22-HR dilaksanakan pada bulan terakhir setiap triwulannya dengan masa pencacahan selama satu minggu dengan pembagian minggu ke-1 sebanyak 2 ruta, minggu ke-2 3 ruta, minggu ke-3 3 ruta dan minggu ke-4 sebanyak 2 ruta. Pada triwulan I target sebanyak 400 sampel rumahtangga yang di data pada periode Januari-Maret 2022 dengan jumlah dokumen sebanyak 400 dokumen. Capaian realisasi pencacahan HR selama periode Januari-Maret 2022 sebesar 100 persen. Pada triwulan II target sebanyak 540 sampel rumah tangga yang di data pada periode April-Juni 2022 dengan jumlah dokumen sebanyak 540 dokumen. Capaian realisasi pencacahan HR selama periode April-Juni 2022 sebesar 100 persen. Pada triwulan III target sebanyak 530 sampel rumah tangga yang di data pada periode Juli-September 2022 dengan jumlah dokumen sebanyak 530 dokumen. Capaian realisasi pencacahan HR selama periode Juli-September 2022 sebesar 100 persen. Pada triwulan IV target sebanyak 530 sampel rumah tangga yang di data pada periode Oktober-Desember 2022 dengan jumlah dokumen sebanyak 530 dokumen. Capaian realisasi pencacahan HR selama periode Oktober-Desember 2022 sebesar 100 persen. Selanjutnya hasil isian HR selama seminggu di rekap kedalam dokumen VBH22-LK;

- (4) Pencacahan pengeluaran konsumsi bukan makanan, pengeluaran bukan konsumsi dan pendapatan/penerimaan rumah tangga yang belum tercakup dalam VBH22-BL dengan menggunakan kuesioner VBH22-S, pencacahan VBH22-S berbarengan dengan pencacahan VBH22-HR, sehingga jadwal dan jumlah sama dengan VBH22-HR. Capaian realisasi pencacahan VBH22-S selama tahun 2022 sebesar 100 persen.

Identifikasi Kendala Pelaksanaan Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Survei Biaya Hidup tahun anggaran 2022 di Kabupaten Bandung diantaranya:

- (1) Kegiatan pelatihan petugas yang bersifat online yang dilaksanakan pada akhir tahun 2021 menyebabkan penyampaian materi dari instruktur ke petugas

- menjadi kurang optimal. Sehingga pada saat memulai kegiatan lapangan, beberapa petugas masih sedikit kebingungan dalam melaksanakan pencacahan;
- (2) Masih adanya responden yang slow respon bahkan nonrespon, sehingga harus dilakukan pergantian sampel;
 - (3) Responden ada yang enggan untuk mengisi secara mandiri seluruh pengeluaran, sehingga covered jumlah komoditas yang didata kurang optimal;
 - (4) Petugas masih kurang dalam probing terkait seluruh pengeluaran responden.



PRESTASI DAN INOVASI BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Upaya dan kerja keras para pegawai BPS Kabupaten Bandung untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, telah membawa satker BPS Kabupaten Bandung dalam memperoleh beberapa penghargaan atas prestasi kinerja baik para pegawai BPS Kabupaten Bandung dalam penyelesaian tugas dan fungsinya. Penghargaan tersebut diberikan oleh pihak eksternal dari Kementerian Keuangan khususnya di lingkup KPPN Bandung II, maupun penghargaan dari pihak internal di lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan rincian Piagam penghargaan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Piagam penghargaan ***Satker Peringkat kedua Terbaik Kategori Jumlah Transaksi Kartu Kredit (KKP) Terbanyak Tahun Anggaran 2021***. Diberikan oleh **KPPN Bandung II** pada tanggal 31 Januari 2022.
2. Piagam penghargaan ***Peringkat Terbaik Pertama Dalam Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*** Diberikan oleh **Kepala BPS Provinsi Jawa Barat** pada tanggal 2 Maret 2022.
3. Piagam penghargaan ***Insan Statistik Teladan Ir Wanwan Herawan Tahap Satu*** Diberikan oleh **Kepala Badan Pusat Statistik** pada tanggal 23 Agustus 2022.
4. Piagam penghargaan ***12 (dua belas) Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022***. Diberikan oleh **Deputi Bidang Statistik Sosial** di Hotel Holiday Inn Bandung pada tanggal 21 Desember 2022.

B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2022

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM DAN SASARAN

Pagu yang diberikan Pemerintah untuk satker BPS Kabupaten Bandung dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang Statistik, sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 57.035.804.000,-. Anggaran kegiatan 2022 tersebut diarahkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Nasional BPS. Badan Pusat Statistik memiliki 4 (empat) program anggaran, namun pada satker BPS Kabupaten Bandung sendiri tahun anggaran 2022 ini hanya terdapat 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dibidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.
2. Program Dukungan Manajemen BPS (Dukman). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan Kapasitas SDM; (b) Penataan Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*; dan (c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Nilai Pagu anggaran pada tahun 2022 mengalami peningkatan pagu anggaran sebesar 548,74 persen atau meningkat sebesar Rp.48.243.9953.000,-, jika dibandingkan dengan nilai pagu anggaran pada tahun 2021 (sebesar Rp. 8.791.809.000,-). Hal ini dapat dilihat pada tabel rincian perbandingan Pagu anggaran tahun 2021 dan 2022 menurut program di bawah ini. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan pagu anggaran terbesar terdapat pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yaitu naik sebesar Rp. 47.779.133.000,- atau naik hingga 1.344,65 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang banyak melibatkan para petugas Mitra Statistik, dengan pagu anggaran Regsosek sebesar Rp. 39.578.265.000,-.

**Tabel 22. Perbandingan Pagu Anggaran
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021-2022**

Program	Pagu Akhir Tahun 2021 (Rp.)	Pagu Akhir Tahun 2022 (Rp.)	Selisih (Rp.)	Persentase kenaikan (%)
Program Dukungan Manajemen (Dukman)	5.238.540.000	5.703.402.000	464.862.000	8,87
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	3.553.269.000	51.332.402.000	47.779.133.000	1.344,65
Jumlah	8.791.809.000	57.035.804.000	48.243.995.000	548,74

Pada tahun 2022 ini, hal yang sama terjadi juga pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) atau yang pada tahun-tahun sebelumnya lebih dikenal sebagai Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Pagu anggaran Program Dukman tahun 2022 naik sebesar 8,87 % dengan kenaikan pagu sebesar Rp. 464.862.000,- .

Berdasarkan Tingkat Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2022 dapat dilihat bahwa Realisasi secara keseluruhan adalah sebesar 99,19 persen dari total pagu tersedia. Rincian realisasi daya serap anggaran menurut program, masing masing adalah sebagai berikut : 99,74 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan 93,13 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Rincian Realisasi Penyerapan anggaran tahun 2022 pada Program Dukungan Manajemen dibandingkan dengan penyerapan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 23. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2022
Menurut Program**

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Sisa (%)
Program Dukungan Manajemen (Dukman)	5.703.402.000	5.688.512.095	99,74	14.889.905	0,26
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	51.332.402.000	50.884.806.184	99,13	447.595.816	0,87
Total	57.035.804.000	56.573.318.279	99,19	462.485.721	0,81

Jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya secara keseluruhan telah terjadi peningkatan daya serap anggaran sebesar 2,33 persen. Kontribusi Peningkatan daya serap anggaran berasal dari peningkatan daya serap anggaran Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar 0,55 persen, sedangkan pada Program Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terjadi peningkatan daya serap anggaran sebesar 5,70 persen.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2021-2022 Menurut Program

Program	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Dukungan Manajemen (Dukman)	5.238.540.000	5.195.875.071	99,19	5.703.402.000	5.688.512.095	99,74
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	3.553.269.000	3.319.921.527	93,43	51.332.402.000	50.884.806.184	99,13
Total	8.791.809	8.511.111.113	96,81	57.035.804	56.573.318.279	99,19

Adanya peningkatan daya serap anggaran pada Program Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) ini disebabkan masih terdapat tambahan anggaran yang relatif besar, yaitu senilai sebesar Rp. 39.578.265.000,- untuk pelaksanaan Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada empat bulan terakhir 2022.

**Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Program PPIS
Menurut Rincian Output Kegiatan**

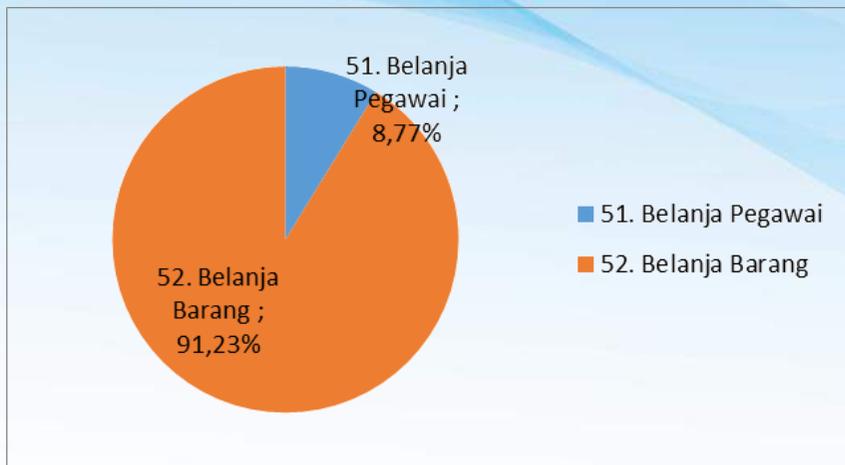
NO	KODE DAN RINCIAN OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp_
1	2897.BDB.003 LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	600.000	-	-	600.000
2	2897.BMA.004 LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK	25.045.000	22.225.000	88,74	2.820.000
3	2898.BMA.007 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN	26.808.000	26.599.000	99,22	209.000
4	2899.BMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI	8.869.000	8.683.000	97,90	186.000
5	2900.BMA.005 DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI	312.000	-	-	312.000

NO	KODE DAN RINCIAN OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp_
6	2902.BMA.004 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI	12.246.000	12.244.090	99,98	1.910
7	2903.BMA.009 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA	1.641.445.000	1.561.686.115	95,14	79.758.885
8	2904.BMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI	297.802.000	295.462.500	99,21	2.339.500
9	2905.BMA.004 PUBLIKASI/LAPORAN SAKERNAS	286.667.000	257.701.000	89,90	28.966.000
10	2905.QMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PENDUDUK	4.958.448.000	4.925.177.817	99,33	33.270.183
11	2906.BMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN SUSENAS	518.077.000	497.625.577	96,05	20.451.423
12	2907.BMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	9.552.000	9.551.700	100,00	300

NO	KODE DAN RINCIAN OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp_
13	2907.QMA.009 PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI	39.578.265.000	39.357.117.137	99,44	221.147.863
14	2908.BMA.004 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA	67.205.000	67.038.100	99,75	166.900
15	2908.QMA.009 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK E-COMMERCE	21.410.000	21.363.700	99,78	46.300
16	2909.BMA.005 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEPAT WAKTU	6.995.000	6.770.000	96,78	225.000
17	2910.BMA.008 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	9.828.000	6.080.600	61,87	3.747.400

NO	KODE DAN RINCIAN OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp_
18	2910.QMA.006 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK SENSUS PERTANIAN	3.487.278.000	3.469.634.548	99,49	17.643.452
19	2910.QMA.007 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN	107.820.000	76.987.800	71,40	30.832.200
20	2910.QMA.010 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA	267.730.000	262.858.500	98,18	4.871.500
JUMLAH		51.332.402.000	50.884.806.184	99,13	447.595.816

Berdasarkan alokasi pagu anggaran BPS Kabupaten Bandung akhir tahun 2022 menurut komposisi jenis belanja terhadap total Pagu Belanja, pagu anggaran tertinggi terdapat pada anggaran belanja barang sebesar 91,23 persen dan pagu anggaran belanja pegawai sebesar 8,77 persen dan untuk Pagu anggaran belanja modal tidak tersedia pada akhir tahun 2022 karena ditarik kembali pada awal tahun.



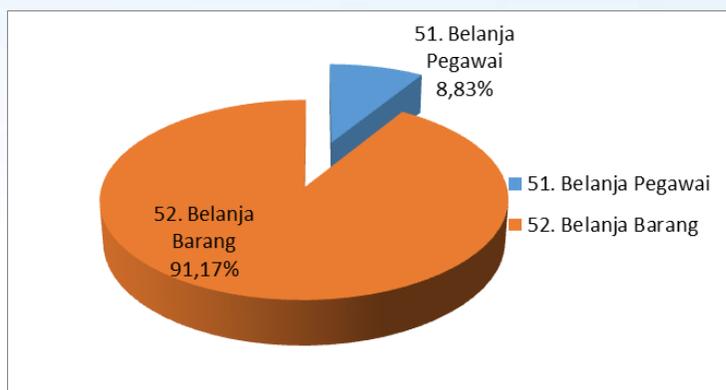
Gambar 11. Komposisi Alokasi Anggaran menurut Jenis Belanja terhadap Total Pagu BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022

Perbandingan tingkat penyerapan anggaran terhadap Pagu masing-masing jenis belanja menurut jenis belanja pada tahun 2022, persentase daya serap anggaran tertinggi terdapat pada Belanja Pegawai sebesar 99,83 persen, dan realisasi pada belanja barang sebesar 99,13 persen.

Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2022 Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Sisa (%)
51 Belanja Pegawai	5.004.444.000	4.995.887.456	99,83	8.556.544	0,17
52 Belanja Barang	52.031.360.000	51.577.430.823	99,13	453.929.177	0,87
Total	57.035.804.000	56.573.318.279	99,19	462.485.721	0,81

Komposisi Realisasi belanja per jenis belanja tahun 2022 terhadap nilai total realisasi belanja di BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 8,83 persen untuk belanja pegawai dan 91,17 persen untuk belanja barang.



Gambar 12. Komposisi Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN SASARAN

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong setiap satuan kerja (satker) yang berada pada setiap Kementerian/Lembaga (K/L), untuk senantiasa meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan dari seluruh anggaran belanja yang telah dialokasikan harus diarahkan untuk dapat mencapai target kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap satuannya setiap tahun. Adapun alokasi anggaran tahun 2022 yang tersedia, berdasarkan rincian Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel 27 di bawah ini.

Tabel 27. Alokasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022
Menurut Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
SS 1.1 Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	51.306.757.000	50.862.581.184	99,13	444.175.816
SS 2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	25.045.000	22.225.000	88,74	2.820.000
SS 3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	600.000	0	0,00	600.000
SS 4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	5.703.402.000	5.688.092.095	99,73	15.309.905
Total	57.035.804.000	56.572.898.279	99,19	462.905.721

Capaian Realisasi anggaran terhadap pagu yang tertinggi dicapai pada Sasaran Strategis keempat, yaitu SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan mencapai 99,73 persen. Dari Pagu yang tersedia sebesar Rp. 5.703.402.000,- dapat terserap sebesar Rp. 5.688.092.095,-.

Realisasi anggaran terendah dicapai oleh Sasaran Strategis ketiga, yaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN, yang hanya dapat mencapai realisasi sebesar 0 persen. Dari Pagu yang tersedia berupa transport kunjungan ke Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung untuk kegiatan Survei Kepuasan Data (SKD)

sebesar Rp. 600.000,- tidak dapat terserap karena lokasi sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung terletak satu kompleks dengan kantor BPS Kabupaten Bandung.

Tabel 28. Efisiensi Anggaran berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran terhadap Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022

Indikator Sasaran Strategis		Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Efisiensi (%)
SS 1.1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	101	50.862.581.184	99,13	55.41
SS 2.1	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	100	22.225.000	88,74	78.15
SS 3.1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	100	0	0,00	100.00
SS 4.1	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	107	5.688.092.095	99,73	66.68
Total			56.572.898.279	99,19	56.73

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BPS Kabupaten Bandung melalui Form Rencana Aksi BPS tahun 2022, diperoleh nilai efisiensi menurut Sasaran Strategis yang dapat dilihat pada tabel 28. Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa tingkat efisiensi anggaran tertinggi dicapai oleh sasaran strategis ketiga yaitu Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I dengan nilai efisiensi sebesar 100 persen. Hal ini dapat menggambarkan dari nilai persentase capaian kinerja yang dicapai oleh sasaran

strategis tersebut di tahun 2022 sebesar 100 persen dengan capaian realisasi anggarannya hanya sebesar 0 persen.

Selanjutnya nilai efisiensi kedua tertinggi dicapai oleh tujuan strategis kedua, yaitu Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN dengan nilai efisiensi sebesar 78,15 persen. Urutan tingkat efisiensi berikutnya yaitu dicapai oleh sasaran keempat, yaitu SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan nilai efisiensi sebesar 66,68 persen. Sedangkan tingkat efisiensi terendah dicapai oleh sasaran pertama yaitu Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas sebesar 55,41 persen.

Berdasarkan tabel 28 di atas, secara keseluruhan tingkat efisiensi anggaran berdasarkan rata-rata capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai nilai sebesar 56.73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BPS Kabupaten Bandung dapat menggunakan anggaran secara efektif dan berhasil melakukan efisiensi penganggaran dalam mencapai target kinerja tahun 2022 sesuai tujuan dari sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Namun demikian, perlu kerja keras bersama untuk mendongkrak nilai capaian kinerja sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas agar lebih meningkat tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja bagi satuan kerja BPS Kabupaten Bandung.

Mulai tahun 2018 kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), telah mulai melakukan Penilaian Kinerja dalam pelaksanaan anggaran APBN seluruh satker yang berada di setiap Kementerian dan Lembaga pemerintah Pusat setiap bulan, terkait dengan kepatuhan satker terhadap pemenuhan jadwal dan ketertiban pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.

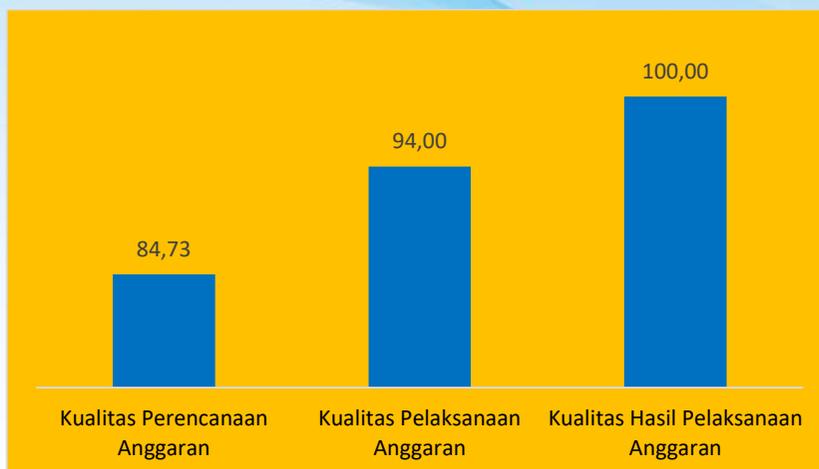
Pada tahun 2022, melalui 3 (tiga) aspek penilaian dan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA), yang terdiri dari aspek penilaian dan Indikator penilaian sebagai berikut :

Aspek Penilaian IKPA	Indikator Penilaian IKPA
1. Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA
	Deviasi Halaman III DIPA
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Belanja Kontraktual
	Penyelesaian Tagihan
	Pengelolaan UP dan TUP
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Dispensasi SPM
	Capaian Output

Pada tahun 2022 penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh satker secara rutin dengan perhitungan kumulatif setiap bulan terhadap seluruh indikator IKPA. Hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh setiap satuan kerja yang dapat diakses melalui Sistem Aplikasi OM-SPAN pada alamat website <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan hasil pengukuran **Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)** tahun 2022, BPS Kabupaten Bandung memperoleh Nilai akhir IKPA sebesar **92,19 %**. Rincian hasil penilaian terhadap aspek maupun indikator IKPA 2022 adalah sebagai berikut :

1. Nilai **Aspek 1. Kualitas Perencanaan Anggaran** adalah sebesar **84,73 %**, yang berasal dari nilai capaian kinerja Indikator : Revisi DIPA sebesar 100 %, dan Deviasi Halaman III DIPA sebesar 69,45 %.
2. Nilai **Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran** adalah sebesar **94,00 %**, yang terdiri dari nilai capaian kinerja Indikator : Penyerapan Anggaran 79,98 sebesar 100 %, Belanja Kontraktual sebesar 100 % , Penyelesaian Tagihan sebesar 95,24 %, Pengelolaan UP dan TUP sebesar 99,77% dan Dispensasi SPM sebesar 95 %.
3. Nilai **Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran** adalah sebesar **100 %**, yang berasal dari nilai capaian kinerja Indikator : Capaian Output sebesar 100 %.



Gambar 13. Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022 (persen)

Hasil penilaian secara lengkap baik rincian aspek, indikator, nilai bobot nilai maupun nilai akhir penilaian IKPA BPS Kabupaten Bandung tahun 2022 tersaji pada tabel 29 berikut :

Tabel 29. Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022

Aspek	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	84,73
	Deviasi Halaman III DIPA	69,45	10	6,95	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	79,98	20	16	94,00
	Belanja Kontraktual	100	10	10	

Aspek	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
	Penyelesaian Tagihan	95,24	10	9,52	
	Pengelolaan UP dan TUP	99,77	10	9,98	
	Dispensasi SPM	95	5	4,75	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total				92,19	
Konversi Bobot				100%	
Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)				92,19	

Tabel 29 memperlihatkan perbandingan hasil penilaian IKPA tahun 2021 dengan hasil penilaian IKPA 2022. Pada penilaian tahun 2022 terdapat beberapa penyederhaan dengan berkurangnya beberapa indikator penilaian seperti : **Pagu Minus, LPJ Bendahara, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Retur SP2D , Kesalahan SPM**, sehingga tersisa hanya 8 indikator penilaian, serta perubahan dalam bobot penilaian.

Beberapa hal yang cukup menggembirakan pada hasil capaian nilai IKPA BPS Kabupaten tahun 2022 ini adalah :

1. Terdapat 3 (tiga) indikator IKPA memiliki nilai IKPA yang baik secara maksimal sebesar 100 %, yaitu untuk indikator **Revisi DIPA, Data/Belanja Kontraktual dan Konfirmasi /Capaian Output**
2. Terjadinya peningkatan nilai IKPA pada Indikator **Pengelolaan UP & TUP**, naik 18,77 %

Namun disamping keberhasilan di atas, masih terdapat Terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan hasil penilaian IKPA , sehingga yang perlu ditingkatkan lagi nilai capaian kinerjanya, yaitu pada :

1. Indikator **Deviasi Hal III DIPA** mengalami penurunan nilai IKPA sebesar 15,78 % , hal ini disebabkan pada tahun 2022 terdapat perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan karena dinamika perubahan anggaran (Pengurangan dan penambahan Pagu) dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan teknis statistik (Pengurangan dan penambahan kegiatan survei/sensus) sepanjang tahun.
2. Indikator **Dispensasi SPM** mengalami penurunan nilai IKPA sebesar 5,00 % , hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Dokumen Regsosek 2022 yang menyebabkan Nilai SPM berkurang dari yang direncanakan.

Hasil penilaian IKPA tahun 2021 dan hasil penilaian IKPA 2022 sebelum bobot tertimbang masing-masing sebesar 89,15 % dan 92,19 % , sehingga terjadi peningkatan sebesar 3,04 % dan setelah adanya kenaikan bobot tertimbang dari 95% ke 100% nilai hasil akhir tahun 2022 menjadi sebesar 92,19 % atau turun 1,65 % dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 30. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021-2022**

No	Jenis Indikator Penilaian	2021			2022			Selisih
		Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai
1	Revisi DIPA	100	5	5	100	10	10	0
2	Deviasi Hal III DIPA	85,23	5	4,26	69,45	10	6,95	-15,78
3	Pagu Minus	100	5	5	-	-	-	-
4	Data/Belanja Kontraktual	100	10	10	100	10	10	0
5	Pengelolaan UP & TUP	81	8	6,48	99,77	10	9,98	18,77
6	LPJ Bendahara	100	5	5	-	-	-	-
7	Dispensasi SPM	100	5	5	95	5	4,75	-5
8	Penyerapan Anggaran	81,31	15	12,2	-	-	-	-
9	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	-	-	-	-
10	Konfirmasi Capaian Output	100	17	17	100	25	25	0
11	Retur SP2D	99,17	5	4,96	-	-	-	-
12	Kesalahan SPM	85	5	4,25	-	-	-	-

No	Jenis Indikator Penilaian	2021			2022			Selisih
		Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai
	Nilai Total		89,15			92,19		3,04
	Konversi Bobot (%)		95%			100%		0,05
	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		93,84			92,19		-1,65

Capaian nilai akhir IKPA tahun 2022 yang relatif baik tetap di atas 90 %, tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari seluruh pihak yang kepentingan dalam pengelolaan anggaran di BPS Kabupaten Bandung. Hasil ini menunjukkan bahwa satker BPS Kabupaten Bandung sudah termasuk dalam kategori penilaian satker yang telah melaksanakan anggaran dengan relatif baik.

UPAYA EFISIENSI BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung selama tahun 2022 diantaranya adalah penghematan sumber daya dan penganggaran. BPS Kabupaten Bandung telah berupaya untuk melakukan penghematan sumberdaya energi listrik, dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar senantiasa melakukan pengecekan sebelum pulang kerja di masing-masing ruangan kerja, dengan cara mematikan AC (*Air Conditioner*), Monitor PC (*Personal Computer*), CPU (*Computer Processing Unit*), UPS (*Uninterrupted Power Supply*) komputer, Televisi dan lampu ruangan. Jika melihat realisasi anggaran Listrik 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, upaya penghematan listrik tahun ini belum berhasil menekan penggunaan listrik dan menghemat biaya pemakaian listrik karena adanya kegiatan pengolahan uji coba *Proxy Mean Test* (PMT) Pendataan Awal Registrasi Ekonomi Sosial 2022 yang

melaksanakan pengolahan selama 1 (satu) bulan yang melibatkan 86 petugas entry. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya pemakaian senilai Rp. 6.109.548,-.

**Tabel 31. Perbandingan Nilai Biaya Penggunaan/Langgan Listrik
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2022 (Rupiah)**

Uraian	2020	2021	2022	Selisih 2021 - 2022
Biaya Penggunaan/ Langganan Listrik (Rp.)	26.944.511,-	21.463.009,-	27.572.557	6.109.548

Penghematan biaya penggunaan telpon kantor, dilaksanakan dengan pemberitahuan dan himbuan kepada seluruh pegawai agar penggunaan telpon kantor hanya digunakan khusus untuk kepentingan dinas saja bukan keperluan pribadi. Hal ini tampaknya relatif berhasil dengan melihat adanya penurunan total pembayaran biaya langganan telpon dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 32. Perbandingan Nilai Biaya Langganan Telpon per Tahun
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022 (Rupiah)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Biaya Langganan Telpon per Tahun (Rp.)	1.676.878,-	1.414.511,-	1.115.684,-	1.071.456,-	983.956,-

Upaya penghematan penggunaan Sumber daya air dilakukan dengan cara : pemeriksaan kebocoran tanki, penggantian pipa instalasi air yang bocor dan kran-kran air secara berkala, penjadwalan pengisian tanki air, pemasangan pelampung pada tanki

penampungan air dan himbauan bagi para pegawai menutup kran air pada saat yang bersangkutan akan keluar dari kamar mandi/toilet.

Upaya penghematan lainnya adalah penggunaan kembali kertas bekas pakai pada balik halaman yang masih kosong untuk melakukan pencetakan *draft* laporan, absensi manual, memo presensi, penempelan bon bukti belanja pada lampiran SPJ dan sebagainya.

Pada Tabel Rincian Revisi DIPA di bawah ini, dapat dilihat bahwa untuk DIPA tahun anggaran 2022 telah terjadi beberapa kali Revisi Anggaran berupa *Selfblocking Automatic Adjustment*, penambahan dan pengurangan pagu anggaran dalam rangka peningkatan efisiensi/penghematan, dan optimalisasi efektivitas penggunaan anggaran di BPS Kabupaten Bandung.

Rincian revisi perubahan PAGU Anggaran dari awal sampai dengan akhir revisi anggaran dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali revisi anggaran dengan rincian : 2 kali *Selfblocking Automatic Adjustment* (SAA), 3 kali revisi pengurangan pagu anggaran, 3 kali revisi penambahan pagu anggaran, 1 kali revisi buka blokir, dan 8 kali revisi penyesuaian/pergeseran rincian anggaran.

Tabel 33. Rincian Revisi DIPA Anggaran Tahun 2022

Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Kewenangan
01	15 Desember 2021	Revisi DIPA Se Indonesia terkait Automatic Adjustment Belanja Kementrian/L	25.498.203.000	25.498.203.000	0	DJA

embaga TA
2022

02	20 Januari 2022	Revisi Pemutakhiran Data POK TA 2022 dan RPD Halaman III DIPA		25.498.203.000	25.498.203.000	0	DJPB
03	9 Februari 2022	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran		25.498.203.000	18.179.968.000	-7.318.235.000	DJA
04	25 Maret 2022	Revisi Pemutakhiran Data POK TA 2022 dan RPD Halaman III DIPA		18.179.968.000	18.179.968.000	0	DJPB
05	27 Mei 2022	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan		18.179.968.000	18.480.101.000	300.133.000	DJA

Dasar Hitung
Anggaran

06	15 juni 2022	Revisi DIPA terkait Penambahan Automatic Adjustment Belanja TA 2022	18.480.101.000	18.480.101.000	0	DJA
07	23 Juni 2022	Revisi Pemutakhiran Data POK TA 2022 dan RPD Halaman III DIPA	18.480.101.000	18.480.101.000	0	DJPB
08	25 Juli 2022	Revisi Pemutakhiran Data POK TA 2022 dan RPD Halaman III DIPA	18.480.101.000	18.480.101.000	0	DJPB
09	11 Agustus 2022	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan	18.480.101.000	19.081.693.000	601.592.000	DJA

Dasar Hitung
Anggaran

10	25 Agustus 2022	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena penambahan anggaran kegiatan Pendataan Regsosek	19.081.693.000	58.909.958.000	39.828.265.000	DJA
11	29 Agustus 2022	Revisi DIPA Se Indonesia karena Proses Buka Blokir Anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	58.909.958.000	58.909.958.000	0	DJA
12	20 September 2022	Revisi Pemutakhiran Data POK TA 2022 dan RPD Halaman III DIPA	58.909.958.000	58.909.958.000	0	DJPB

13	20 Oktober 2022	Revisi DIPA Se Indonesia karena Pemenuhan Belanja Pegawai dan Perubahan Dasar Hitung Anggaran	58.909.958.000	58.598.180.000	-311.778.000	DJA
14	21 November 2022	Revisi Pemutakhiran Data POK TA 2022 dan RPD Halaman III DIPA	58.598.180.000	58.598.180.000	0	DJPB
15	12 Desember 2022	Revisi Anggaran BPS Seluruh Indonesia	58.909.958.000	57.035.804.000	-1.874.154.000	DJA
16	23 Desember 2022	Revisi Pemutakhiran Data POK TA 2022 dan RPD Halaman III DIPA	57.035.804.000	57.035.804.000	0	DJPB

17	16 Januari 2023	Revisi Pemutakhiran Data POK TA 2022	57.035.804.000	57.035.804.000	0	DJPB
----	--------------------	---	----------------	----------------	---	------

Pada revisi pertama di bulan Desember 2021 revisi yang terjadi berupa *Self blocking Automatic Adjustment* Anggaran Belanja Pegawai, yaitu pada Belanja Tunjangan Kinerja pegawai sebesar 5% Pagu senilai Rp. 274,280,000,-. Sedangkan pada revisi keenam tanggal 23 Juni 2022 terdapat *Self blocking Automatic Adjustment* Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 1.653.521.000,-, sehingga nilai total *Self blocking Automatic Adjustment (SAA)* tahun 2022 sebesar Rp. 1.927.801.000,-. Adapun Rincian Output yang mengalami *Self blocking Automatic Adjustment* tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 34. Rincian Output yang mengalami *Self blocking Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2022

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Nilai Self <i>blocking Automatic Adjustment (Rp.)</i>
1	2886	EBA962	Layanan Umum	3.366.000
2	2886	EBA994	Layanan Perkantoran	274.280.000
3	2886	EBC954	Layanan Manajemen SDM	850.000
4	2886	EBD952	Layanan Perencanaan dan Panganggaran	3.705.000
5	2886	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	1.980.000

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Nilai Self bloking Automatic Adjustment (Rp.)
6	2897	BDB003	LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	1.051.000
7	2897	BMA004	LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK	11.545.000
8	2898	BMA007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN	1.780.000
9	2899	BMA006	PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI	1.150.000
10	2900	BMA005	DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI	312.000
11	2902	BMA004	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI	4.690.000
12	2903	BMA009	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA	401.059.000
13	2904	BMA006	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI	382.456.000
14	2905	BMA004	PUBLIKASI/LAPORAN SAKERNAS	12.829.000
15	2905	QMA006	PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PENDUDUK	414.428.000

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO		Nilai Self bloking Automatic Adjustment (Rp.)
16	2906	BMA006	PUBLIKASI/LAPORAN SUSENAS		10.248.000
17	2907	BMA006	PUBLIKASI/LAPORAN KETAHANAN SOSIAL	STATISTIK	3.408.000
18	2907	BMA008	PUBLIKASI/LAPORAN PODES	PENDATAAN	65.031.000
19	2908	BMA004	PUBLIKASI/LAPORAN KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA	STATISTIK	34.853.000
20	2908	QMA009	PUBLIKASI/ LAPORAN E-COMMERCE	STATISTIK	21.410.000
21	2909	BMA005	PUBLIKASI/LAPORAN PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEPAT WAKTU	STATISTIK	93.098.000
22	2910	BMA008	PUBLIKASI/LAPORAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	STATISTIK	5.993.000
23	2910	QMA006	PUBLIKASI/LAPORAN PERTANIAN	SENSUS	139.441.000
24	2910	QMA007	PUBLIKASI/ LAPORAN TANAMAN PANGAN	STATISTIK	31.922.000
25	2910	QMA010	PUBLIKASI/ LAPORAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA	STATISTIK	6.916.000

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Nilai Self bloking Automatic Adjustment (Rp.)
Jumlah				1.927.801.000

Pada Revisi DIPA ke-3 terjadi pengurangan Pagu anggaran pada Rincian Output Layanan Prasarana Internal dan Publikasi/Laporan Sensus Penduduk Anggaran, sedangkan beberapa Rincian Output lainnya mengalami penambahan anggaran. Perubahan Pagu Rincian Output tersebut adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 35. Perubahan Pagu Rincian Output Anggaran Tahun 2022

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Pagu Semula	Pagu Revisi	Selisih Pagu
1	2886	EBA956	Layanan BMN	900.000	900.000	-
2	2886	EBA962	Layanan Umum	6.732.000	6.732.000	-
3	2886	EBA994	Layanan Perkantoran	5.136.243.000	55.136.243.000 0	-
4	2886	EBB971	Layanan Prasarana Internal	7.500.000.000	-	(7.500.000.000)
5	2886	EBC954	Layanan Manajemen SDM	1.700.000	1.700.000	-
6	2886	EBD952	Layanan Perencanaan dan Panganggaran	8.050.000	8.050.000	-

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Pagu Semula	Pagu Revisi	Selisih Pagu
7	2886	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	14.400.000	14.400.000	-
8	2897	BDB003	LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	1.651.000	1.651.000	-
9	2897	BMA004	LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK	36.590.000	36.590.000	-
10	2898	BMA007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN	23.779.000	26.243.000	2.464.000
11	2899	BMA006	PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI	5.415.000	10.019.000	4.604.000
12	2900	BMA005	DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI	624.000	624.000	-
13	2902	BMA004	PUBLIKASI/LAPORAN	2.142.000	16.936.000	14.794.000

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Pagu Semula	Pagu Revisi	Selisih Pagu
			STATISTIK DISTRIBUSI			
14	2903	BMA009	PUBLIKASI/LAP ORAN STATISTIK HARGA	1.578.947.000	2.037.923.000	458.976.000
15	2904	BMA006	PUBLIKASI/LAP ORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGA N DAN PENGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI	596.656.000	602.993.000	6.337.000
16	2905	BMA004	PUBLIKASI/LAP ORAN SAKERNAS	215.078.000	299.496.000	84.418.000
17	2905	QMA006	PUBLIKASI/LAP ORAN SENSUS PENDUDUK	7.875.331.000	5.135.506.000	(2.739.825.000)
18	2906	BMA006	PUBLIKASI/LAP ORAN SUSENAS	390.096.000	528.325.000	138.229.000
19	2907	BMA006	PUBLIKASI/LAP ORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	9.600.000	12.960.000	3.360.000
20	2907	BMA008	PUBLIKASI/LAP ORAN PENDATAAN PODES	61.523.000	65.031.000	3.508.000

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Pagu Semula	Pagu Revisi	Selisih Pagu
21	2908	BMA004	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA	78.314.000	80.624.000	2.310.000
22	2909	BMA005	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEPAT WAKTU	68.642.000	100.094.000	31.452.000
23	2910	BMA008	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	15.710.000	5.821.000	111.000
24	2910	QMA006	PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PERTANIAN	1.456.324.000	3.626.719.000	2.170.395.000
25	2910	QMA007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN	139.110.000	139.742.000	632.000

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Pagu Semula	Pagu Revisi	Selisih Pagu
26	2910	QMA010	PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA	274.646.000	274.646.000	-
Jumlah				25.498.203.000	8.179.968.000	(7.318.235.000)

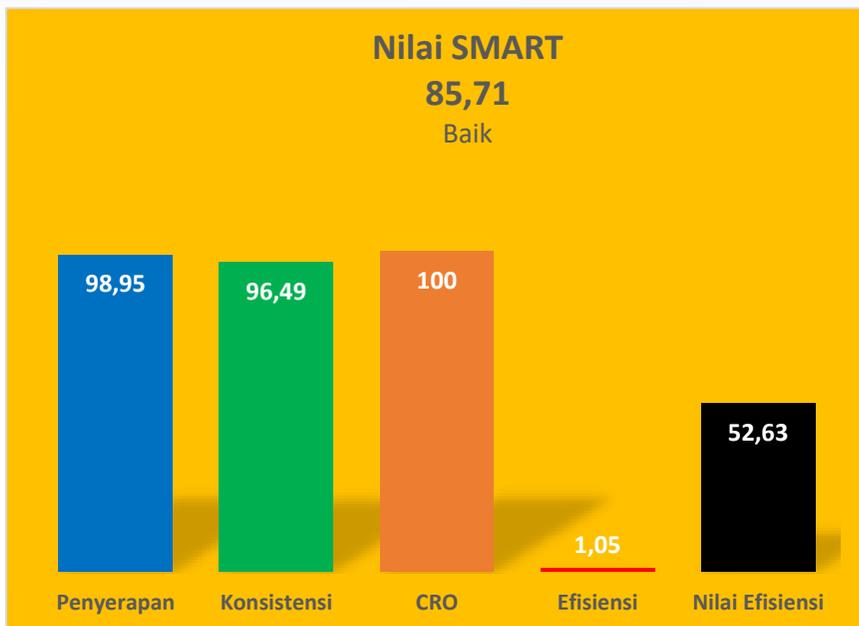
Revisi Pengurangan Pagu anggaran terjadi pada lagi pada revisi ke-13 tanggal 20 Oktober 2022 melalui DJA, berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-731/02000/PR.440/09/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022 terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 311.778.000 dalam rangka Revisi DIPA Se Indonesia karena Pemenuhan Belanja Pegawai dan Perubahan Dasar Hitung Anggaran. Kemudian pada Revisi ke-15 tanggal 12 Desember 2022, kembali terjadi revisi pengurangan Pagu Anggaran berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-988/02000/PR.440/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Realokasi *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara, Pagu Anggaran *Selfblocking Automatic Adjustment* (SAA) BPS Kabupaten Bandung dikembalikan ke Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara senilai Rp. 1.874.154.000,-

Selama tahun 2022 berdasarkan proses Revisi DIPA di atas apabila tanpa melihat adanya tambahan anggaran kegiatan Regsosek 2022, BPS Kabupaten Bandung telah melaksanakan penghematan/refocussing/pengurangan anggaran secara kumulatif sebesar Rp. 9.504.167.000,- dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas penggunaan anggaran belanja, dan penghematan anggaran negara.

Berbagai upaya tersebut mengantarkan efisiensi anggaran satker BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2022 menjadi sebesar 2,69 persen, sementara nilai efisiensi

terhitung sebesar 56,73 persen berdasarkan hasil penilaian pada Form Rencana Aksi (FRA) Tahun 2022, Nilai efisiensi ini didapat dengan membandingkan antara nilai pagu, realisasi dan capaian kinerja tahun 2022.

Sementara berdasarkan hasil penilaian pada dashboard Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan, nilai efisiensi anggaran satker BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2022 adalah sebesar 52,63 persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 14. Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2022

04

PENUTUP



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kinerja BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2022 relatif tercapai dengan baik. Capaian kinerja sasaran tercapai sebesar 102,34 persen. Keseluruhan tujuan kinerja tercapai dengan hasil yang optimal. Bahkan 2 (dua) dari 4 (empat) tujuan berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Hal yang sama juga terlihat dalam perkembangan capaian kinerja terhadap target Renstra tahun 2024. Dua dari empat tujuan kinerja telah berhasil melampaui target akhir Renstra dalam waktu tiga tahun kinerja periode Renstra 2020-2024. Sementara dua tujuan sisanya masing-masing telah mencapai 83,33 dan 94,74 persen dari target akhir Renstra.

Dari sisi pengguna data, hasil SKD menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pengguna terhadap data dan informasi yang dihasilkan BPS sudah baik ditunjukkan dengan 94,44 persen pengguna menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Selain itu, hasil SKD juga menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi pada kualitas sarana dan prasarana pelayanan data BPS dengan capaian 98,48 persen. Sedangkan beberapa target IKU terkait komitmen SSN dan penguatan statistik sektoral oleh K/L/D/I juga menghasilkan capaian yang baik. Hal ini menunjukkan kemampuan BPS Kabupaten Bandung sebagai pembina kegiatan statistik yang semakin baik.

Dilihat dari sisi anggaran, BPS Kabupaten Bandung telah mengelola anggaran dengan relatif baik karena capaian nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) tetap diatas 90 persen. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari seluruh pegawai. Selain itu, sinergi dari seluruh pegawai juga telah diterapkan untuk

mengupayakan efisiensi tidak hanya dari sisi penganggaran namun juga dari sisi sumber daya.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dan usaha dari semua pihak dalam hal ini semua bidang-bidang teknis yang didukung dengan pengelolaan administrasi yang tepat. Berbagai penghargaan yang diterima oleh BPS Kabupaten Bandung merupakan bukti kinerja BPS Kabupaten Bandung yang dinilai baik, namun demikian BPS Kabupaten Bandung tetap harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya menjadi semakin baik dan berkinerja tinggi.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Tindak lanjut yang perlu dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah :

- (1) Pemberian arahan, bimbingan terkait penggunaan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di sektornya masing-masing kepada pengguna data, khususnya para OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk peningkatan fungsi koordinatif dengan walidata dan produsen data guna mendukung pencapaian tujuan pertama.
- (2) Terus mempertahankan kerjasama yang terjalin dengan baik dan terus melakukan sosialisasi yang lebih intens dengan OPD Pemerintah Kabupaten Bandung guna mendukung pencapaian tujuan kedua.
- (3) Sosialisasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan juga meningkatkan fungsi koordinatif walidata guna mendukung pencapaian tujuan ketiga.
- (4) Meningkatkan kerja sama untuk kemajuan bersama, penyempurnaan sistem penguatan akuntabilitas kinerja, penyusunan dan penerapan sistem manajemen kinerja , sistem monitoring dan evaluasi serta penyusunan indikator kinerja untuk dapat diterapkan demi tercapainya kinerja instansi yang akuntabel dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan keempat

Halaman ini sengaja dikosongkan

05

LAMPIRAN



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN BANDUNG 2021-2024

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas					
Indikator :					
Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	75%	92%	92%	92%	93%
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN					
Indikator :					
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistic	-	-	25	25	30
Indikator :					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	-	-	50	55	60
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
SS.3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I					
Indikator :					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	-	-	90	90	95

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
T.4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi					
SS.3. SDM Statistik Yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan					
Indikator :					
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	61,2	69,5	69,5	70	70,5
Indikator :					
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	75	75	93	93	94

LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA BPS KABUPATEN BANDUNG 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hartadi, S.ST, M.E
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dyah Anugrah Kuswardani MA
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

(Dyah Anugrah Kuswardani MA.)
NIP. 19620314 198501 2 001

Bandung, 26 Januari 2022
Pihak Pertama

(Agung Hartadi, S.ST, M.E.)
NIP. 19750909 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021	REALISASI	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	92	70,59	92
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	100	100	90
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	100	100	25
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	44,12	44,12	50
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	-	-	90

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021	REALISASI	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	69,5	69,39	69,5
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	75	90,625	93

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen	Rp. 12.668.025.000
2. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 12.830.178.000
Jumlah	Rp. 25.498.203.000

Pihak Kedua

(Dyah Anugrah Kuswardani MA.)
NIP. 19620314 198501 2 001

Bandung, 26 Januari 2022

Pihak Pertama

(Agung Hartadi, S.ST, M.E.)
NIP. 19750909 199403 1 001

LAMPIRAN 3. RINCIAN SDM ASN BPS KABUPATEN BANDUNG AKHIR 2022

No.	Jenis Jabatan	Jenjang Pendidikan						Total
		SMP	SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pejabat Administrator/Eselon III					1		1
2	Pejabat pengawas/Eselon IV					1		1
3	Staf Pelaksana Fungsional Umum		1	3	5			9
4	Kelompok Jabatan Fungsional							28
	- Pranata Keuangan APBN Terampil		1					1
	- Pranata Komputer Ahli Muda				1			1
	- Statistisi Ahli Madya					1		1
	- Statistisi Pelaksana Lanjutan		2	2				4
	- Statistisi Penyelia		2		2			4
	- Statistisi Ahli Pertama				6	3		9
	- Statistisi Ahli Muda				5	3		8
	Jumlah Total		6	5	19	9	0	39

LAMPIRAN 4. JADWAL KEGIATAN SURVEI DAN PENGOLAHAN BPS KABUPATEN BANDUNG 2022

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Statistik Sosial													
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	√	√										
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran		√	√									
3	Updating listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan							√	√				
4	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan								√	√			
6	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021		√	√									
7	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021			√	√								
8	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021								√	√			

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9	Survei Statistik Polkam		√	√	√	√							
10	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2022				√								
11	Pendataan LF Sensus Penduduk 2021					√	√						
Statistik Produksi													
1	Updating Direktori Industri Besar-Sedang (IBS)	√	√	√									
2	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Tahunan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Listing							√					
5	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan									√			
6	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Listing			√									
7	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan	√			√			√			√		
8	Survei Kerangka Sampel Area (KSA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan												
		Bulan ke-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Survei Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Survei Peternakan Tahunan (Laporan Ternak Sapi Perah)		√	√	√	√	√	√	√	√				
11	Survei Peternakan Tahunan (Laporan Perusahaan Ternak Besar Kecil)		√	√	√	√	√	√	√	√				
12	Survei Peternakan Tahunan (Laporan Perusahaan Ternak Unggas)		√	√	√	√	√	√	√	√				
13	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Listing				√				√					√
14	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Pencacahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Survei Hortikultura				√	√	√	√	√	√				
16	Survei Konstruksi Triwulanan				√			√			√			√
17	Survei Konstruksi Tahunan		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
18	Survei SP-Lahan	√												
19	Survei SP- Benih	√												
20	Survei SP- Alsin	√												
21	Survei SP Padi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22	Survei SP Palawija	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Survei SPH-Lahan	√												√
24	Survei SPH- SBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan												
		Bulan ke-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	Survei SPH-BST	√			√			√		√		√		√
26	Survei SPH-TH	√			√			√		√		√		√
27	Survei SPH-TBF	√			√			√						√
28	Survei SPH-Benih	√												√
29	Survei Kostruksi Tahunan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
30	Survei Kostruksi TRIWULANAN				√			√			√			
31	Updating Direktori Konstruksi			√	√	√								
32	Survei Captive Power			√	√	√								
33	Survei Penggalan Berbadan Hukum		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
34	Survei Penggalan Usaha Rumah tangga (URT)			√	√	√								
35	Survei Energi Listrik			√	√	√								
Statistik Distribusi														
1	PJ/AJR				√	√	√	√	√					
2	PAW				√	√	√							
3	POLDIS				√	√	√							
4	HD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	HKD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	HPS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	HPG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	HPBG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	HPT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	HPJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan												
		Bulan ke-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	SHPB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	IKK	√			√			√			√			
13	SBH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	BUMD			√	√	√	√	√						
15	K2			√	√	√	√	√	√					
16	K3			√	√	√	√	√						
17	UPD Dir Par	√	√	√										
18	VHTS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
19	VHTL				√	√	√	√						
20	VDTW				√	√	√	√						
21	Vrest				√	√	√	√						
22	BCS				√	√	√							
23	SLK			√	√	√	√	√	√	√	√			
24	PBJ								√	√	√	√	√	√
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik														
1	Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha	√	√	√	√									
2	Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran	√	√	√	√									
3	Penyusunan Statistik Daerah								√	√				
4	Penyusunan Inkesra Survei Penyusunan Nilai Tambah										√	√		
5	Lapangan Usaha Barang Triwulanan (SKTNPB)	√			√			√			√			
7	SKPR Dinas	√												

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)				√			√			√		√
9	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPR)				√			√			√		√
10	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)									√			
11	Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)							√	√				
12	Survei Khusus Neraca Produksi							√	√				
13	Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (SKPS)							√	√				
14	Pengumpulan data realisasi APBD	√			√			√			√		
15	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)							√	√				
16	Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK)							√	√				
17	Survei PMTB Dinas							√	√				
18	Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ)								√				
19	Updating LNP							√	√				
20	Pengumpulan Data PDAM	√			√			√			√		

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan												
		Bulan ke-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	Pengumpulan Fenomena Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik														
1	Pengolahan Sakernas		√							√				
2	Pengolahan Susenas			√							√			
3	Pemutakhiran Geospasial Muatan Wilkerstat ST 2023					√		√						
4	Penyusunan DDA	√	√											
5	Penyusunan KCDA			√	√	√	√	√	√	√				
6	Pemutakhiran MFD							√						√
7	Pendataan SKD	√	√	√	√	√	√	√						
8	Pendataan Metadata									√	√	√	√	
9	Pengolahan LF-SP2020						√	√						

LAMPIRAN 5. TARGET – REALISASI KEGIATAN/RESPONSE RATE SURVEI DAN PENGOLAHAN BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
Statistik Sosial					
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	Dokumen	135	135	100
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	Dokumen	270	270	100
3	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan	Dokumen	1080	1080	100
4	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2021	Dokumen	117	117	100
5	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2021	Dokumen	1170	1170	100
6	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) September 2021	Dokumen	270	270	100
7	Survei Statistik Polkam	Dokumen	3	3	100
8	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2021	Dokumen	160	1606	100
Statistik Produksi					
1	Updating Direktori Industri Besar-Sedang (IBS)	Dokumen	1661	1661	100
2	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Bulanan	Dokumen	360	246	68,33
3	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Tahunan	Dokumen	1061	300	28,27

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
4	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan	Dokumen	549	549	100
5	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan	Dokumen	1130	1130	100
6	Survei Kerangka Sampel Area (KSA)	Dokumen	2712	2712	100
7	Survei Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)	Dokumen	80	80	100
8	Survei Peternakan Tahunan (Laporan Perusahaan Ternak Sapi Perah)	Dokumen	2	2	100
9	Survei Peternakan Tahunan (Laporan Perusahaan Ternak Besar)	Dokumen	3	3	
10	Survei Peternakan Tahunan (Laporan Perusahaan Ternak Unggas)	Dokumen	2	2	100
11	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Listing	Dokumen	96	96	100
12	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Pencacahan	Dokumen	450	336	74,67
13	Survei Hortikultura	Dokumen	461	461	100
14	Survei Konstruksi Triwulanan	Dokumen	3	3	100
15	Survei SP-Lahan	Dokumen	31	31	100
16	Survei SP- Benih	Dokumen	31	31	100
17	Survei SP- Alsin	Dokumen	31	31	100
18	Survei SP Padi	Dokumen	372	372	100
19	Survei SP Palawija	Dokumen	372	372	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
20	Survei SPH-Lahan	Dokumen	31	31	100
21	Survei SPH- SBS	Dokumen	372	372	100
22	Survei SPH-BST	Dokumen	124	124	100
23	Survei SPH-TH	Dokumen	124	124	100
24	Survei SPH-TBF	Dokumen	124	124	100
25	Survei SPH-Benih	Dokumen	31	31	100
26	Survei Kostruksi Tahunan	Dokumen	17	7	41,00
27	Updating Direktori Konstruksi	Dokumen	50	50	100
28	Survei Captive Power	Dokumen	23	23	100
31	Survei Penggalan Berbadan Hukum	Dokumen	36	16	44,44
32	Survei Penggalan Usaha Rumah tangga (URT)	Dokumen	26	26	100
33	Survei Energi Listrik	Dokumen	2	2	100
Statistik Distribusi					
1	HP	Dokumen	852	840	98,59
2	HPJ	Dokumen	24	24	100
3	HPT	Dokumen	24	24	100
4	HPG	Dokumen	156	156	100
5	HPBG	Dokumen	84	84	100
7	HD	Dokumen	216	216	100
8	HKD	Dokumen	72	72	100
9	HPB	Dokumen	300	300	100
10	VHTS	Dokumen	50	46	92
11	IKK	Dokumen	104	104	100
13	Updt Dir Hotel	Dokumen	47	47	100
14	VHTL	Dokumen	105	105	100
15	VDTW	Dokumen	64	64	100
16	VREST	Dokumen	24	22	91,67
17	SLK	Dokumen	16	16	100
18	POLDIS	Dokumen	26	26	100
19	PAW	Dokumen	108	108	100
20	APBD/K2	Dokumen	1	1	100
21	K3	Dokumen	30	30	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
22	BUMD	Dokumen	3	3	100
23	PJ/AJR	Dokumen	1	1	100
24	BCS	Dokumen	46	46	100
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik					
1	Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha	Publikasi	1	1	100
2	Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran	Publikasi	1	1	100
3	Penyusunan Statistik Daerah	Publikasi	1	1	100
4	Penyusunan Inkesra	Publikasi	1	1	100
5	Survei Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan (SKTNPB)	Dokumen	20	20	100
6	SKPR Dinas	Dokumen	12	12	100
7	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)	Dokumen	120	120	100
8	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPR)	Dokumen	40	40	100
9	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)	Dokumen	10	10	100
10	Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)	Dokumen	6	6	100
11	Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP)	Dokumen	19	19	100
12	Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (SKPS)	Dokumen	5	6	100
13	Pengumpulan data realisasi APBD	Dokumen	12	12	100
14	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)	Dokumen	30	30	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
15	Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK)	Dokumen	25	25	100
16	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Dinas	Dokumen	7	7	100
17	Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ)	Dokumen	6	6	100
18	Updating LNP	Daftar	10	10	100
19	Pengumpulan Data PDAM	Data	4	4	100
20	Pengumpulan Fenomena Triwulanan	Daftar	12	12	100
Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik					
1	Pengolahan Sakernas	Dokumen	1.485	1.485	100
2	Pengolahan Susenas	Dokumen	1.557	1.557	100
3	Penyusunan DDA	Publikasi	1	1	100
4	Penyusunan KCDA	Publikasi	31	31	100
5	Pemutakhiran MFD (Master File Desa)	Set	1	1	100
6	Pendataan SKD (Survei Kebutuhan Data)	Dokumen	30	34	100
7	Pendataan Metadata	Dokumen	8	8	100
8	Pengolahan LF-SP2020				

LAMPIRAN 6. JUDUL PUBLIKASI YANG TERBIT TAHUN 2022

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
1	Kabupaten Bandung Dalam Angka 2022	Tahunan
2	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2022	Tahunan
3	Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2022	Tahunan
4	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2022	Tahunan
5	Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2022	Tahunan
6	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2018-2022	Tahunan
7	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran 2018-2022	Tahunan
8	Kecamatan Ciwidey Dalam Angka 2022	Tahunan
9	Kecamatan Rancabali Dalam Angka 2022	Tahunan
10	Kecamatan Pasirjambu Dalam Angka 2022	Tahunan
11	Kecamatan Cimaung Dalam Angka 2022	Tahunan
12	Kecamatan Pangalengan Dalam Angka 2022	Tahunan
13	Kecamatan Kertasari Dalam Angka 2022	Tahunan
14	Kecamatan Pacet Dalam Angka 2022	Tahunan
15	Kecamatan Ibum Dalam Angka 2022	Tahunan
16	Kecamatan Paseh Dalam Angka 2022	Tahunan
17	Kecamatan Cikancung Dalam Angka 2022	Tahunan
18	Kecamatan Cicalengka Dalam Angka 2022	Tahunan
19	Kecamatan Nagreg Dalam Angka 2022	Tahunan
20	Kecamatan Rancaekek Dalam Angka 2022	Tahunan
21	Kecamatan Majalaya Dalam Angka 2022	Tahunan
22	Kecamatan Solokan Jeruk Dalam Angka 2022	Tahunan

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
23	Kecamatan Ciparay Dalam Angka 2022	Tahunan
24	Kecamatan Baleendah Dalam Angka 2022	Tahunan
25	Kecamatan Arjasari Dalam Angka 2022	Tahunan
26	Kecamatan Banjaran Dalam Angka 2022	Tahunan
27	Kecamatan Cangkuang Dalam Angka 2022	Tahunan
28	Kecamatan Pameungpeuk Dalam Angka 2022	Tahunan
29	Kecamatan Katapang Dalam Angka 2022	Tahunan
30	Kecamatan Soreang Dalam Angka 2022	Tahunan
31	Kecamatan Kutawaringin Dalam Angka 2022	Tahunan
32	Kecamatan Margaasih Dalam Angka 2022	Tahunan
33	Kecamatan Margahayu Dalam Angka 2022	Tahunan
34	Kecamatan Dayeuhkolot Dalam Angka 2022	Tahunan
35	Kecamatan Bojongsoang Dalam Angka 2022	Tahunan
36	Kecamatan Cileunyi Dalam Angka 2022	Tahunan
37	Kecamatan Cilengkrang Dalam Angka 2022	Tahunan
38	Kecamatan Cimenyan Dalam Angka 2022	Tahunan
39	Analisis Survei Kebutuhan Data 2022	Tahunan

LAMPIRAN 7. PIAGAM PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2022

1. Piagam penghargaan Satker Peringkat kedua Terbaik Kategori Jumlah Transaksi Kartu Kredit (KKP) Terbanyak Tahun Anggaran 2021. Diberikan oleh KPPN Bandung II pada tanggal 31 Januari 2022.



2. Piagam penghargaan **Peringkat Terbaik Pertama Dalam Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19** Diberikan oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2022.



3. Piagam penghargaan ***Insan Statistik Teladan Ir Wanwan Herawan Tahap Satu*** Diberikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik pada tanggal 23 Agustus 2022.



4. Piagam penghargaan ***12 (dua belas) Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022***. Diberikan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial di Hotel Holiday Inn Bandung pada tanggal 21 Desember 2022.



Halaman ini sengaja dikosongkan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BPS KABUPATEN BANDUNG

Jalan Raya Soreang Km. 17

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Soreang
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Telp. 022 5895905 Fax. 022 5889882 Email : bps3204@bps.go.id

Homepage, <https://bandungkab.bps.go.id>